

Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di

Indonesia



Tesis

Oleh:

Salma Dyah Purnamawati

No. Mahasiswa: 22919050

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

**Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di
Indonesia**

TESIS

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Magister Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Bisnis dan Ekonomika UII**

Oleh:

Nama: Salma Dyah Purnamawati

No. Mahasiswa: 22919050

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIS

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 25 Juni 2025



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Salma Dyah Purnamawati".

Salma Dyah Purnamawati

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 25 Juni 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk penelitian sebagai salah satu syarat kelulusan. Shalawat serta salam tidak lupa dipanjkatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits dan kita tunggu syafaatnya di akhir zaman.

Penelitian yang berjudul “Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam Program Magister (S-2) Prodi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang sudah menciptakan alam semesta beserta isinya, serta sudah memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan kesehatan kepada hamba-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi panutan dan sudah mengajarkan kepada umat-Nya menuju jalan yang benar.

3. Orang tua penulis yang selalu mendukung penulis hingga penulis sampai ke titik sekarang. Semoga beliau diberikan selalu diberikan amal dan rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.
4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku dosen pembimbing tesis penulis yang sudah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, kelancaran, perlindungan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
6. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia sekaligus dosen penguji saya.
7. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala dukungan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
8. Teman penulis, Septy yang mau membantu penulis dalam mengerjakan tesis, termasuk dalam hal mengumpulkan data, ditengah-tengah kesibukannya.
9. Teman-teman penulis lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah penulis reportkan dari awal pembuatan tesis sampai tesis ini selesai serta sudah mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan maupun pihak-pihak yang belum disebutkan oleh penulis, semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dan diberikan rezeki yang melimpah. Tesis yang dibuat oleh penulis ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritikan dan saran untuk menyempurnakan tesis ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salma Dyah Purnamawati', written in a cursive style.

Salma Dyah Purnamawati

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Pernyataan Bebas Plagiaris	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstrak	1
BAB I - PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II - KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1. Literatur Review	15
2.2. Landasan Teori	18
2.2.1. Teori keagenan dan legitimasi institusional.....	18
2.2.2. Transparansi	19
2.3. Hipotesis	20
BAB III - METODE PENELITIAN	25
3.1. Desain Penelitian	25
3.2. Operasional Variabel	25
3.3. Metode Penelitian.....	26
3.3.1. Pengukuran.....	26
3.3.2. Analisis.....	30
BAB IV - HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Pemilihan Sampel.....	36

4.2.	Model Estimasi.....	36
4.2.1.	Uji Chow	36
4.2.2.	Uji Hausman	37
4.3.	Uji Asumsi Klasik	38
4.3.1.	Uji Normalitas.....	38
4.3.2.	Uji Multikolinearitas	38
4.3.3.	Uji Heteroskedastisitas.....	39
4.4.	Uji Hipotesis.....	41
4.4.1.	Persamaan Regresi	41
4.4.2.	Uji t	42
BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN		47
5.1.	Kesimpulan.....	47
5.2.	Keterbatasan Penelitian	48
5.3.	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50
LAMPIRAN 1 - VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN		59
LAMPIRAN 2 - RASIO KEMANDIRIAN.....		75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 – Penelitian Sebelumnya.....	17
Tabel 3.1 – Skor Penilaian Komponen Laporan Keuangan.....	27
Tabel 3.2 – Pengukuran Variabel.....	29
Tabel 4.1 – Sampel yang Sesuai Kriteria.....	36
Tabel 4.2 – Uji Chow.....	37
Tabel 4.3 – Uji Hausman.....	37
Tabel 4.4 – Uji Normalitas.....	38
Tabel 4.5 – Uji Multikolinearitas.....	39
Tabel 4.6 – Uji Heteroskedastisitas.....	40
Tabel 4.7 – Uji t.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 – Grafik Perkara TPK Berdasarkan Wilayah	7
Gambar 1.2 – Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Tahun 2020	10
Gambar 1.3 – Grafik Perkara TPK di Wilayah Jawa	10
Gambar 2.1 - Kerangka Konseptual.....	24
Gambar 4.1 – Histogram Uji Normalitas	38
Gambar 4.2 – Grafik Residual	41

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 - VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN	59
LAMPIRAN 2 - RASIO KEMANDIRIAN.....	75

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti mengenai determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia menggunakan teori keagenan dan teori institusional dan variabel ukuran Pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan temuan audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi data panel menggunakan *software eViews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan temuan audit tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menganalisis pengaruh ukuran Pemerintah daerah, rasio kemandirian dan temuan audit terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa antara tahun 2016 sampai 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam pelaporan laporan keuangan, transparansi menjadi salah satu faktor penting yang menjadi penilaian kinerja dari laporan keuangan. Dalam pemerintahan yang demokratis, transparansi menjadi isu utama yang biasanya diangkat. Transparansi juga dapat berfungsi sebagai pengawasan, sehingga dapat mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau badan milik pemerintah. Di Indonesia sendiri, kasus korupsi yang dilakukan oleh suatu individu maupun sekelompok individu sudah sering sekali terjadi.

Transparansi yang berasal dari kata transparan di dalam KBBI dapat diartikan sebagai sesuatu yang jelas. Mardiasmo (2018) mengartikan transparansi sebagai keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjadikan transparansi sebagai salah satu hal penting dalam pelaporannya (paragraf 25). Transparansi harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat serta masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Indonesia, 2010). Selain

itu, diterbitkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen yang mengatur kewajiban setiap instansi publik untuk mengumumkan informasi yang dimiliki kepada masyarakat. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan media internet untuk menyajikan dan menyebarkan laporan keuangannya (Pina dkk, 2010).

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa kegiatan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan dan memperoleh dukungan legitimasi kegiatan organisasi dan pelaporannya harus sesuai dengan harapan masyarakat dan mencerminkan kepentingan sosial dan nilai lingkungan hidup. Adanya tuntutan masyarakat terhadap organisasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program yang mendorong dilakukannya pemeriksaan yang tidak hanya terbatas pada kepatuhan tetapi juga kinerja (Badjuri & Trihapsari, 2004), sehingga transparansi sangat dibutuhkan dalam penilaian organisasi sektor publik.

Istilah *electronic government* atau sering disingkat *e-government* muncul seiring dengan adanya perkembangan teknologi berupa internet yang berdampak pada pemerintah yang juga harus ikut berkembang serta beradaptasi, termasuk dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menggunakan jaringan internet (Dhevina, 2018). Bertot dkk. (2010) menyatakan bahwa dengan adanya kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi dipandang secara efektif dapat meminimalkan biaya dalam menciptakan transparansi dan mengurangi korupsi di sektor pemerintahan. *The Government Finance Officers Association* (GFOA, 2018) telah lama mendorong pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dengan membuat informasi keuangan berkualitas tinggi dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya, dimana dalam pengaplikasiannya diwujudkan dengan adanya situs pemerintah. Beberapa manfaat dalam menggunakan situs pemerintah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan seperti:

1. Kesadaran yang meningkat
2. Aksesibilitas universal
3. Potensi interaksi dengan pengguna, dimana dalam situs dapat menawarkan format dua arah, yaitu multi-percakapan, atau interaktif
4. Keberagaman, kemungkinan tersedianya informasi keuangan yang sama dalam berbagai bahasa, yang mungkin diperlukan sesuai dengan kebijakan entitas pemerintah tertentu
5. Analisis yang terfasilitasi, dengan menggunakan alat terkomputerisasi dapat mencari, mengekstrak, dan menganalisis data yang disajikan dalam bentuk elektronik
6. Peningkatan efisiensi, dengan menyajikan semua informasi keuangan di satu lokasi
7. Menurunkan biaya

8. Kontribusi yang keberlanjutan, dengan mengurangi penggunaan kertas
9. Memperluas cakupan potensi dengan penggunaan *hyperlink* dalam memberikan referensi informasi yang relevan dari situs lain

Di Indonesia, informasi melalui situs pemerintah daerah diungkapkan dengan beberapa cara, seperti pengungkapan informasi secara lengkap dan ada pula yang moderat atau minimal (Afryansyah & Haryanto, 2013). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188-52/1797/SJ/2012 (Indonesia, 2012) tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah mengatur tentang kewajiban kepala daerah untuk menyusun laporan perkembangan transparansi pengelolaan anggaran daerah pada tiap situs daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami (Medina, 2012). Dengan adanya instruksi tersebut menyebabkan terdapat tingkat kemudahan yang tinggi bagi masyarakat karena pengguna dapat menemukan dan melihat informasi keuangan (Styles & Tennyson, 2007) dan non-keuangan di situs pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya finansial (aset) dan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah untuk mewujudkan infrastruktur di bidang teknologi informasi.

Bentuk dari penyelenggaraan dan kinerja organisasi sektor publik dapat dinilai dan diketahui perkembangannya dicerminkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagai bentuk

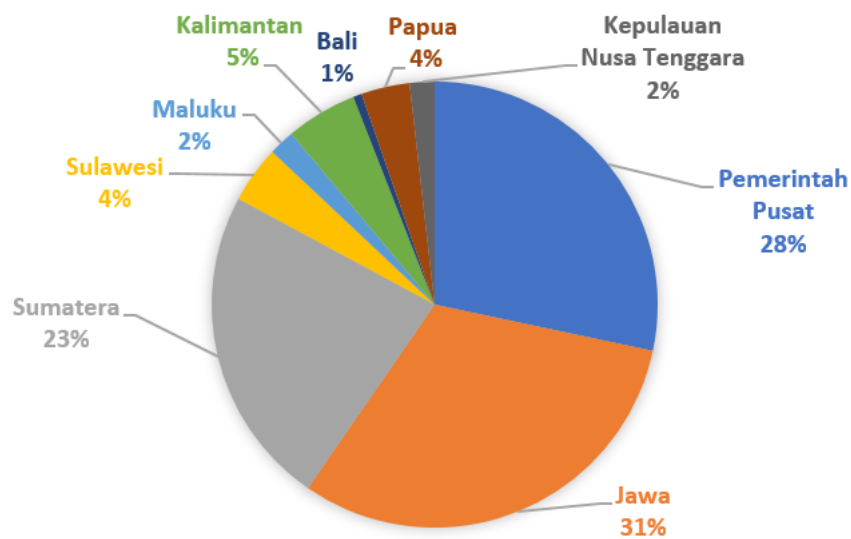
pertanggungjawaban pelaksanaan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunannya harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan pemerintah. Apa yang hadir dalam LKPD diharapkan dapat menjadi program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam perkembangan zaman yang semakin maju, akses untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut semakin dipermudah. Penggunaan internet dan perangkat, baik berupa perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*) sudah semakin sering dijumpai dan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi tersebut. Instansi pemerintah memanfaatkan perkembangan zaman tersebut dengan berbagai cara, untuk menunjukkan terjaganya transparansi dalam penyelenggaraan dan kinerjanya salah satunya dengan mengunggah informasi-informasi tersebut ke dalam situs resmi milik instansi pemerintah, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses informasi tersebut.

Dengan adanya transparansi diharapkan akan berkurangnya tindak kecurangan seperti korupsi yang dapat merugikan. Sayangnya masih banyaknya tindak kecurangan seperti korupsi yang terjadi di beberapa daerah. Dari data KPK mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) berdasarkan yang dikeluarkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024) antara tahun 2012 sampai 2023 memperlihatkan bahwa wilayah Jawa

berada pada posisi pertama dengan persenan 31%, dilanjutkan dengan Pemerintah Pusat (28%), Sumatera (23%), Kalimantan (5%), Sulawesi dan Papua (4%), Maluku dan Kepulauan Nusa Tenggara (2%), serta Bali (1%).

Gambar 1.1 – Grafik Perkara TPK Berdasarkan Wilayah



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Salah satu contoh kasus seperti kasus yang dimuat dalam tempo (2025) tentang kasus korupsi dana hibah dari APBD Pemprov Jawa Timur periode 2019-2022 pada Januari 2025. Dalam kasus ini, penyitaan aset berupa 3 unit tanah di Surabaya dan 1 unit apartemen di Malang yang secara keseluruhannya bernilai Rp 8,1 miliar. KPK menetapkan 21 tersangka, dimana 4 tersangka sebagai penerima dan 17 tersangka merupakan pemberi. 3 orang tersangka penerima merupakan penyelenggara negara dan 1 tersangka merupakan staf dari penyelenggara negara. Selain tanah, KPK juga menggeledah 10 rumah atau bangunan yang berada di beberapa lokasi. Kasus ini merupakan hasil pengembangan kasus yang melibatkan Wakil

Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Parlindung Simanjuntak yang divonis 9 tahun penjara serta denda senilai Rp 1 miliar subsidi penjara 6 bulan pada 26 September 2023. Selain itu, Sahat juga harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 39,5 miliar.

Pemilihan wilayah Jawa didasari salah satunya pada Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah (Keuangan, 2023) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Pada laporan tersebut menyebutkan bahwa data BPS mencatat bahwa wilayah Jawa masih menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana pada triwulan I tahun 2023 berkontribusi sebesar 57,17% pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam perhitungan *z-score*, wilayah Jawa memiliki nilai positif di hampir semua sektor yang dapat diartikan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Wilayah Jawa juga merupakan pusat aktivitas ekonomi, politik, dan sosial, sehingga pelayanan publik diharapkan dapat meningkat dan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengutamakan upaya reformasi birokrasi dan memberikan layanan publik yang lebih baik.

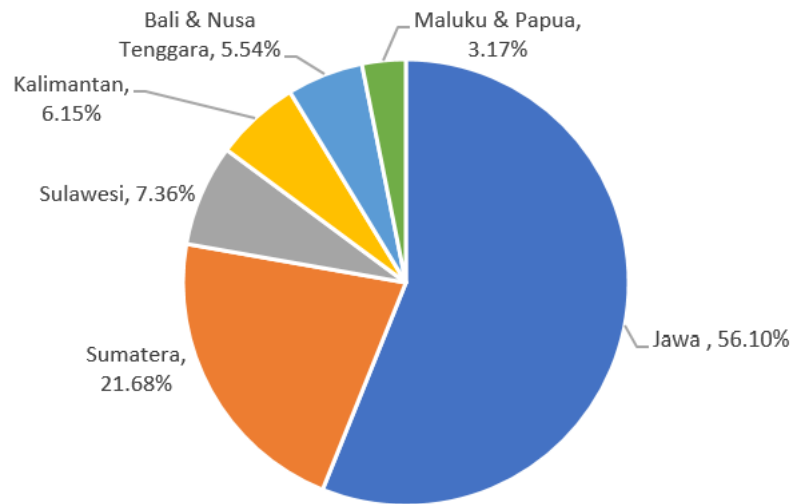
Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Victoria (2023) mengenai analisis ketersediaan dan aksesibilitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah dengan sampel 30 pemerintah daerah se-Jawa dan Bali. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa sebesar 73% Pemerintah daerah memiliki skor indeks aksesibilitas di atas 7, dimana sebagian besar situsnya memiliki tampilan yang beragam sehingga cukup sulit menentukan letak data laporan

keuangan untuk tiap pemerintah daerah. Selain itu, penelitian lain yang dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan temuan audit terhadap keterbukaan informasi keuangan dan lingkungan politik daerah terhadap kinerja pemerintah daerah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kesimpulan yang diberikan adalah kualitas pelaporan keuangan melalui opini audit dan lingkungan politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, besarnya pemerintahan daerah dan tingkat respons pemerintah daerah terhadap peraturan tidak mempengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia (Adiputra dkk, 2018).

Penelitian ini akan menguji mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah dilihat dari aset yang dimiliki pemerintah daerah dan temuan audit berdasarkan teori keagenan sebagai bentuk perencanaan dan tanggung jawab kinerja pemerintah (agen) kepada masyarakat (prinsipal) dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah. Penelitian ini menjadikan pulau Jawa pada tahun 2016 sampai 2021 sebagai sampel penelitian. Pemilihan subjek penelitian tersebut berdasarkan situs (Rainer, 2023) yang berjudul Distribusi Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau/Area, dimana datanya diambil dari sensus BPS pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa Jawa merupakan wilayah dengan populasi terbanyak sebesar 56,1%. Selain itu, Jawa juga merupakan wilayah dengan tingkat TPK paling tinggi (31%). Pemilihan tahun 2016 sampai 2021 didasarkan

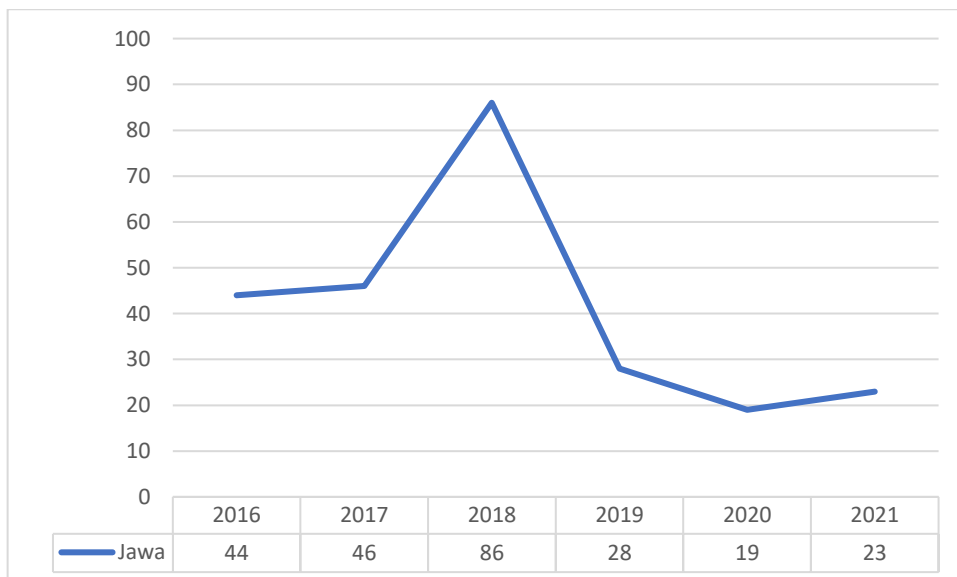
pada data perkara TPK di wilayah Jawa, dimana terdapat penurunan perkara TPK yang tajam pada peralihan antara tahun 2018 sampai 2019.

Gambar 1.2 – Distribusi Penduduk Berdasarkan Wilayah Tahun 2020



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/distribusi-penduduk-indonesia-berdasarkan-pulauarea-sKtCH>

Gambar 1.3 – Grafik Perkara TPK di Wilayah Jawa



Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Penggunaan sampel penelitian tersebut menjadi kebaharuan dalam penelitian dan menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu tidak hanya dalam bidang keilmuan, tapi juga dapat menjadi gambaran dalam bahan penilaian, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah pusat tentang bagaimana kinerja instansi pemerintah.

1.2.Rumusan Masalah

Penelitian saat ini memiliki beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah?
2. Apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah?
3. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah?

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian saat ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk menguji apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah.
2. Untuk menguji apakah rasio kemandirian berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah.
3. Untuk menguji apakah temuan audit pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan oleh peneliti dapat dirasakan dan dapat digunakan oleh masyarakat, pemerintah dan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat tentang bagaimana transparansi laporan keuangan pemerintah daerah baik dari dilihat dari segi ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, maupun dari temuan audit pemerintah daerah. Harapan ke depannya masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur penilaian kinerja pemerintah. Harapan ke depannya, pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai dasar dalam memperbaiki maupun meningkatkan kinerja pemerintah, termasuk dalam membuat peraturan di masa depan.

3. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang dalam mengetahui determinan transparansi laporan keuangan

pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi bias informasi mengenai topik penelitian.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman penelitian. Dalam sistematika penulisan ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai literasi yang digunakan sebagai landasan penulisan penelitian yang berisi teori-teori dan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengembangan hipotesa mengenai pengaruh antara variabel dependen dengan independen yang digunakan beserta teori yang digunakan sebagai dasar hubungan antar variabel tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu terdapat juga penjelasan mengenai operasional variabel-variabel yang akan digunakan serta alat statistika yang digunakan

untuk menyelesaikan dan membuktikan hipotesa yang diajukan oleh peneliti.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menganalisis dan menguraikan data yang sudah didapatkan dari pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya. Data-data yang sudah dianalisis dan diuraikan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk mendapatkan gambaran dari setiap pengujian yang sudah dilakukan.

BAB V KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pengerjaan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini, saran-saran yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah, dan saran-saran kepada peneliti selanjutnya, serta penjelasan mengenai keterbatasan yang didapatkan pada penelitian saat ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Literatur Review

Penelitian yang dilakukan oleh Adiputra dkk (2018) meneliti mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, temuan audit, tingkat respon pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi keuangan dan lingkungan politik daerah terhadap transparansi kinerja pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2016 dengan menggunakan *purposive sampling* dan analisis regresi berganda. Teori yang digunakan berupa teori kelembagaan dan teori keagenan yang merupakan dua teori yang dapat menjelaskan praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teori kelembagaan menyatakan bahwa organisasi merespons tekanan dari konteks kelembagaan mereka. Masalah keagenan muncul ketika prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Di sektor pemerintahan, masalah keagenan terjadi antara pejabat pemerintah terpilih dan kepala sekolah yang ditunjuk serta pemilih (masyarakat) sebagai agen. Pengungkapan informasi keuangan publik melalui internet juga dapat dijelaskan dengan teori keagenan.

Selain itu, digunakan juga teori legitimasi institusional yang dijadikan sebagai justifikasi mengapa pemerintah provinsi harus mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka melalui situs resmi masing-masing pemerintah provinsi. Deegan dkk. (2000) menyatakan bahwa teori legitimasi institusional didasarkan pada pemahaman kontrak sosial antara

institusi sosial dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan fasilitas internet dalam bentuk situs.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi dan Komarudin (2014) mengenai pengaruh persaingan politik, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet pada 2012. Penelitian ini menggunakan 210 pemerintah daerah di Indonesia yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Teori yang digunakan merupakan teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi digunakan sebagai bentuk hubungan antara Pemda sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, dimana Pemda menyelenggarakan pemerintah sesuai kepentingan masyarakat dan masyarakat yang memberikan amanat kepada Pemda untuk menjalankan kegiatan pemerintah. Maka dari itu, Pemda memiliki kewajiban untuk memberikan laporan hasil kerjanya kepada masyarakat. Transparansi informasi dari Pemda digunakan untuk meningkatkan pengaruh antara Pemda dengan masyarakat, serta mengurangi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintahan, seperti laporan keuangan Pemda, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat (Bertot dkk, 2010).

Beberapa hasil peneliti lain yang pernah menguji determinan transparansi seperti yang dilakukan oleh:

Tabel 2.1 – Penelitian Sebelumnya

No.	Variabel yang diteliti	Peneliti
1	Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia	Kurniawan (2018), Trisnawati & Achmad (2014), Rahman dkk (2013)
2	Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia	Adiputra dkk (2018), Waliyyani & Mahmud (2015), Afryansyah & Haryanto (2013)
3	Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia	Dezalinda & Afriyenti (2024), Medina (2012), Dwirandra (2006)
4	Rasio kemandirian berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia	Kurniawan (2018)
5	Rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia	Sapitri & Arza (2024), Putri & Amanah (2020), Setyaningrum & Syafitri (2012)
6	Temuan audit berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Winangsih & Fathah (2023), Adiputra dkk (2018), Handayani (2010)

7	Temuan audit tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia	Waliyyani & Mahmud (2015), Trisnawati & Achmad (2014), Hilmi & Martani (2012)
---	--	---

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Teori keagenan dan legitimasi institusional

Penelitian Falkman dan Tagesson (2008) dan Pina dkk. (2010) menemukan bahwa teori institusional dan teori keagenan merupakan dua teori yang saling melengkapi, sehingga dapat menjelaskan praktik pelaporan keuangan pemerintah daerah. Teori kelembagaan menyatakan bahwa organisasi merespons tekanan dari konteks kelembagaan (DiMaggio & Powell, 2015). Masalah keagenan muncul ketika prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen (Zimmerman, 1977). Di sektor pemerintahan, masalah keagenan terjadi antara pejabat pemerintah yang terpilih sebagai prinsipal, serta para pemilih (masyarakat) sebagai agen (Setyaningrum & Syafitri, 2012). Pengungkapan informasi keuangan publik melalui internet juga dapat dijelaskan dengan teori keagenan (Setyaningrum & Syafitri, 2012; Pina dkk, 2010).

Teori legitimasi institusional digunakan sebagai dasar mengapa pemerintah daerah harus mengungkapkan informasi keuangan secara terbuka melalui situs resmi masing-masing pemerintah daerah. Dalam

buku yang dibuat oleh Deegan dkk. (2011) menyebutkan bahwa teori legitimasi institusional didasarkan pada pemahaman kontrak sosial antara institusi sosial (sektor publik) dan masyarakat.

2.2.2. Transparansi

Piotrowski dan Bartelli (2010) mengatakan bahwa kemudahan mengakses informasi yang dimiliki pemerintah merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antara transparansi dengan masalah etika dan akuntabilitas, serta kemungkinan adanya korupsi dan penyimpangan administratif. Dalam hal pengelolaan sumber daya yang telah menjadi komitmen pemerintah, transparansi adalah gagasan bahwa pemerintah harus transparan dan sedapat mungkin dapat diakses oleh publik (Mahmudi, 2019).

Menurut Andrew dan Edward (2016), sistem transparansi di sebuah organisasi bisa menjadi penentu meningkatnya persepsi kepercayaan secara internal. Sedangkan menurut Indria (2020), transparansi adalah salah satu prinsip dari anti korupsi yang identik dengan keterbukaan dan kejujuran yang menciptakan pribadi yang dapat dipercaya dan berintegritas. Dalam pelayanan kepada masyarakat, transparansi sangat diperlukan. Penerapan transparansi yang melibatkan pegawai dalam mengambil keputusan dapat mengubah pola pikir pegawai instansi, dimana lebih mementingkan perkembangan kemajuan instansi.

2.3.Hipotesis

Ukuran Pemerintah Daerah dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk aset yang dimiliki pemerintah daerah menggambarkan bagaimana aset tersebut digunakan dan bagaimana kinerjanya. Untuk mengetahui aset tersebut yang menjadi penggambaran dari ukuran pemerintah daerah tentu diperlukan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang terdiri dari berbagai instansi-instansi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan informasi-informasi yang dimuat di setiap situs instansi. Teori keagenan dan legitimasi digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atau dapat diartikan sebagai transparansi antara pemerintah daerah sebagai pihak agen dengan masyarakat sebagai pihak prinsipal dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang berisi ukuran pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan ukuran pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ingin menunjukkan bahwa kinerja yang sudah mereka lakukan dapat dinilai baik.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang menguji besar kecilnya daerah dengan informasi yang ada di pemerintah daerah, khususnya keterbukaan informasi keuangan di daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Afriansyah dan Haryanto (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa besarnya ukuran pemerintah daerah pemerintah daerah berbanding lurus dengan kepedulian

masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain yang mendukung hipotesis ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018), Trisnawati & Achmad (2014), Medina (2012), Setyaningrum & Syafitri (2012), Handayani (2010), Yu (2010), dan Laswad dkk (2005). Selain penelitian yang mendukung hipotesis, ada juga penelitian yang menolak hipotesis, seperti penelitian yang dilakukan oleh Adiputra dkk (2018), Waliyyani & Mahmud (2015), Afryansyah & Haryanto (2013), Hilmi & Martani (2012), dan Sinaga (2011).

H1: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia.

Rasio Kemandirian dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan kemampuan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam terwujudnya pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Sumber-sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah (Indonesia, 2014). Penelitian Laswad dkk (2005) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah, dimana sejalan dengan penggunaan teori keagenan dan legitimasi institusional. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka partisipasi

masyarakat dalam pengungkapan dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi yang berarti, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pengungkapan yang dilakukan dalam laporan keuangan pemerintah daerah juga semakin tinggi (Dwirandra, 2008). Penelitian lain yang dilakukan oleh Sapitri & Arza (2024) menunjukkan hasil yang berbeda, dimana rasio kemandirian tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia.

H2: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia.

Temuan Audit dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

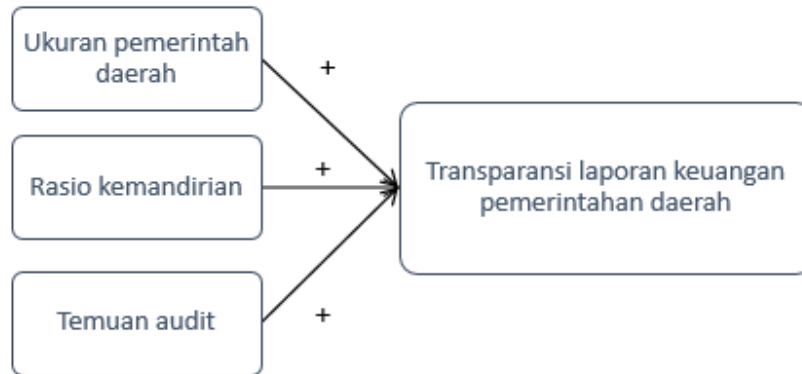
Setelah laporan keuangan pemerintah daerah disusun, maka laporan keuangan tersebut akan siap dipublikasikan kepada publik. Sebelum itu, perlu dilakukan proses audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga audit keuangan baik pihak eksternal maupun internal. Kewajaran suatu laporan keuangan pemerintah menunjukkan bahwa kinerja dari instansi pemerintah dapat dinilai baik. Teori keagenan dan legitimasi institusional digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara tertulis atau dapat diartikan sebagai transparansi antara pemerintah daerah sebagai pihak agen dengan masyarakat sebagai pihak prinsipal dan dituangkan dalam bentuk laporan audit yang menunjukkan temuan audit. Sejalan dengan teori keagenan,

masyarakat sebagai prinsipal akan menuntut kepada pemerintah sebagai agen untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam laporan keuangan daerah melalui pemeriksaan auditor atas kewajaran penyajiannya. Hasil audit berupa opini audit akan memberikan informasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Trisnawati & Achmad, 2014). Meningkatnya temuan audit diharapkan dapat diartikan sebagai peningkatan transparansi yang diberikan pemerintah, karena dapat berpengaruh juga terhadap meningkatkan penilaian audit serta penilaian masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pina dkk. (2010) memberikan bukti empiris bahwa pemerintah daerah akan memperoleh penghargaan dari organisasi eksternal atas praktik pelaporan keuangan yang baik, sehingga cenderung lebih banyak menyajikan laporan keuangannya di internet. Penelitian lain yang mendukung hipotesis seperti yang dilakukan oleh Winangsih & Fathah (2023), Adiputra dkk (2018), Handayani (2010), dan Styles & Tennyson (2007). Selain penelitian yang mendukung, terdapat pula penelitian yang tidak sejalan dengan hipotesis yang tawarkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Waliyyani & Mahmud (2015), Trisnawati & Achmad (2014), dan Hilmi & Martani (2012).

H3: Temuan audit berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia

Gambar 2.1 - Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kuantitatif. Data yang akan digunakan merupakan data sekunder.

3.2.Operasional Variabel

1. Populasi dan Sampel

Menurut Margono (2004), populasi adalah keseluruhan dari data yang kemudian menjadi topik utama atau pusat perhatian dari seorang peneliti. Dalam penelitian ini menjadikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit oleh BPK dan data LKPD yang terdapat di situs pemerintah daerah.

Sampel diartikan oleh Arikunto (2013) sebagai sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini akan menggunakan data-data yang terdapat di LKPD serta tersedia di situs pemerintah daerah di wilayah Jawa, dimana terdapat 114 daerah pada kurun tahun 2016-2021. Kriteria yang diberikan oleh peneliti adalah sampel memiliki ketersediaan data LKPD yang diambil dari situs pemerintah minimal 3 tahun.

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari LKPD kabupaten/kota yang ada di Jawa

yang datanya didapatkan dengan mengakses tiap situs yang dimiliki oleh tiap pemerintah daerah.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Pengukuran

1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yang biasa disimbolkan dengan huruf Y adalah variabel yang memberikan respons pada saat dihubungkan dengan variabel independen dan merupakan variabel yang ingin dijelaskan oleh peneliti (Robbins & Judge, 2016). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menilai transparansi adalah dengan memanfaatkan fasilitas internet serta berbagai bentuk perangkat yang tersedia sehingga informasi tersebut dapat dimuat dalam situs (Sinaga, 2011). Penilaian akan diukur berdasarkan 3 poin utama, yaitu kemudahan akses, ketepatan, dan kelengkapan laporan keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 di tiap situs pemerintah. Pengukuran yang dilakukan berupa memberikan skor 1 untuk data yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan skor 0 untuk data yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Winangsih & Fathah, 2023) dan dijumlahkan. Hasil penjumlahan item yang diungkapkan akan dibagi dengan total item

yang harus diungkapkan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Waliyyani & Mahmud (2015).

Tabel 3.1 – Skor Penilaian Komponen Laporan Keuangan

No.	Komponen		Skor
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
2.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
3.	Neraca	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
4.	Laporan Operasional (LO)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
5.	Laporan Arus Kas (LAK)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
6.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0
7.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Kemudahan Akses	1/0
		Ketepatan	1/0
		Kelengkapan	1/0

2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas yang biasa disimbolkan dengan huruf X adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel (Sujarweni, 2014). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah (X1), rasio kemandirian (X2), dan temuan audit (X3).

a. Ukuran pemerintah daerah (X1)

Besar kecilnya pemerintahan daerah merupakan suatu variabel untuk mengukur sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh (Adiputra dkk, 2018). Pengukuran ukuran pemerintah daerah menggunakan ukuran pemerintah daerah pemerintah yang digambarkan menggunakan rata-rata ukuran pemerintah daerah, seperti yang dikemukakan oleh Medina (2012), Setyaningrum & Syafitri (2012), dan Laswad dkk (2005).

b. Rasio kemandirian (X2)

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatannya dalam hal operasional tanpa ada dana perimbangan dari pemerintah pusat (Dwirandra, 2008). Rasio kemandirian dihitung berdasarkan

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan. Dasar pengukuran sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dezalinda & Afriyenti (2024), Kurniawan (2018), dan Medina (2012)

c. Temuan audit (X3)

Temuan audit merupakan penilaian terhadap penyusunan dan penyajian LKPD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hasil pemeriksaannya berbentuk opini audit. Kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat ditemukan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK (Waliyyani & Mahmud, 2015). Kasus-kasus yang ditemukan BPK tersebut akan menjadi dasar dalam alat ukur jumlah temuan audit.

Tabel 3.2 – Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Sumber
Transparansi laporan keuangan pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item yang harus diungkapkan}}$	Waliyyani & Mahmud (2015)
Ukuran pemerintah daerah	Ln ukuran pemerintah daerah	Medina (2012)

Rasio Kemandirian	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan}}$	Kurniawan (2018)
Temuan audit	Jumlah temuan audit	Waliyyani & Mahmud (2015)

3.3.2. Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Pemilihan analisis regresi data panel didasarkan pada struktur data yang merupakan data panel yang berisi data *cross section* dan data *time series*, dimana unit *cross section* atau beberapa individu yang sama diukur pada waktu yang berbeda/kurun waktu tertentu. Data panel dapat diartikan juga sebagai gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) (Basuki & Prawoto, 2016). Untuk alat yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini menggunakan *software evIEWS*. Pemilihan penggunaan *software evIEWS* didasarkan pada *evIEWS* dapat melakukan panel data dan olah data, sehingga dapat men-generate model *random effect* dan model *fixed effect*. Sekaligus memilih model mana yang paling relevan melalui *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. *EvIEWS* juga dapat mendukung pengujian dengan data *time series*.

1. Model Estimasi

Model estimasi digunakan untuk menentukan model yang akan digunakan. Terdapat tiga model yaitu *Common Effect (CE)*/ *Pooled Least Square (PLS)*, *Fixed Effect (FE)*, dan *Random Effect (RE)*.

Untuk menguji CE dengan FE dapat menggunakan Uji Chow, FE dengan RE dapat menggunakan Uji Hausman, dan CE dengan RE dapat menggunakan Uji *Lagrange Multiplier*. Pengambilan keputusan dari tiap-tiap uji berdasarkan:

a. Uji Chow

- H0 diterima, jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $>0,05$, sehingga model regresi yang dipilih adalah CE
- H1 diterima, jika nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* $<0,05$, sehingga model regresi yang dipilih adalah FE

b. Uji Hausman

- H0 diterima, jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $>0,05$, sehingga model regresi yang dipilih adalah RE
- H1 diterima, jika nilai probabilitas dari *Cross-section random* $<0,05$, sehingga model regresi yang dipilih adalah FE

c. Uji *Lagrange Multiplier*

- H0 diterima, jika nilai *Cross-section Breusch-pangan* $>0,05$, sehingga model yang paling tepat digunakan adalah CE

- H1 diterima, jika nilai *Cross section Breusch-pangan* $<0,05$, sehingga model yang tepat digunakan adalah RE

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa model yang digunakan memiliki ketepatan dalam estimasi (Zaenuddin, 2015). Uji asumsi klasik digunakan sebagai persyaratan statistik yang harus dipenuhi sebelum menggunakan analisis Uji t dan persamaan regresi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah uji asumsi klasik mengalami penyimpangan atau tidak dan mengetahui kelayakan dari model regresi untuk seterusnya akan dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Uji asumsi klasik dilakukan dalam uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi (Ansofino, Joliansis, Yolamanlinda, 2016).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data variabel terikat dan data variabel bebas yang selanjutnya akan dinilai mengenai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dianggap baik jika data terdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel (Sutopo & Slamet, 2017). Uji normalitas dapat diuji dengan beberapa cara, seperti uji *Chi Square*, uji *one sample Kolmogorov-Smirnov*, rasio kurtosis dan rasio *skewness*. Pada penelitian ini, uji *one sample Kolmogorov-Smirnov* akan

digunakan untuk menguji normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas berdasarkan:

- Nilai signifikansi $> 0,05$, menyatakan data distribusi normal.
- Nilai signifikansi $\leq 0,05$, menyatakan data tidak distribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada kesamaan antar variabel independen dalam suatu model (Sujarweni & Wiratna, 2007). Kesamaan ataupun kemiripan antar variabel independen dapat mengganggu pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Terdapatnya korelasi menandakan bahwa model regresi memiliki masalah pada uji multikolinearitas. Kesimpulan uji multikolinearitas diambil berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dimana jika VIF yang dihasilkan memiliki nilai di antara 1-10 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain (Sutopo & Slamet, 2017). Kesamaan dalam varian residual pengamatan antar periode disebut dengan *homoskedastisitas*.

Pada penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode uji Glejser. Pengambilan keputusan didasarkan pada:

- Angka Prob. $> 0,05$, maka dikatakan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas
- Angka Prob. $\leq 0,05$, maka dikatakan terdapat gejala heteroskedastisitas

3. Uji Hipotesis

a. Persamaan Regresi

Analisis regresi data panel ini digunakan dengan menguji variabel bebas dengan variabel terikat, dimana terdapat beberapa individu dalam kurun waktu tertentu. Rumus untuk regresi data panel secara sistematis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu$$

Keterangan:

Y = Transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi Ukuran Pemerintah Daerah

β_2 = Koefisien Regresi Rasio kemandirian

β_3 = Koefisien Regresi Temuan audit

X1 = Variabel Ukuran Pemerintah Daerah

X2 = Variabel Rasio kemandirian

X3 = Variabel Temuan audit

μ = Eror

b. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan level signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Dasar pengambilan keputusan untuk uji t (Ghozali, 2016) sebagai berikut:

- Hasil uji t menghasilkan kesimpulan berpengaruh signifikan jika $p\text{-value} < 0,05$.
- Hasil uji t menghasilkan kesimpulan tidak berpengaruh signifikan jika $p\text{-value} > 0,05$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pemilihan Sampel

Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang berada di wilayah Jawa sebanyak 114 kabupaten/kota dalam kurun waktu 6 tahun, sehingga jumlah sampel sebanyak 684 sampel. Peneliti menggunakan kriteria ketersediaan data LKPD yang diambil dari situs pemerintah minimal 3 tahun. Setelah ditelusuri didapati bahwa terdapat 48 kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga terdapat 288 sampel yang tidak sesuai dengan kriteria. Data yang tersedia berdasarkan kriteria pemilihan sampel didapatkan sampel sebanyak 396 sampel, yang terdiri dari 66 daerah/kota di wilayah Jawa.

Tabel 4.1 – Sampel yang Sesuai Kriteria

	Daerah/kota	Sampel
Banyaknya	114	684
Data LKPD tidak lengkap	(48)	(288)
Sesuai Kriteria	66	396

4.2. Model Estimasi

4.2.1. Uji Chow

Uji yang dilakukan pertama untuk menentukan model estimasi adalah uji chow. Uji chow membandingkan antara *Common Effect (CE)*/

Pooled Least Square (PLS) dengan *Fixed Effect* (FE). Hasil dari uji chow digunakan untuk menentukan uji estimasi selanjutnya.

Tabel 4.2 – Uji Chow

Effect Test	Prob.
<i>Cross-section Chi-square</i>	0,0212

Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Dari uji chow yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari *Cross-section Chi-square* sebesar $0,0212 < 0,05$, dengan keputusan H1 diterima, sehingga model regresi yang dipilih adalah FE dan dilanjutkan dengan Uji Hausman.

4.2.2. Uji Hausman

Uji hausman membandingkan antara *Fixed Effect* (FE) dengan *Random Effect* (RE). Hasil uji hausman akan menjadi penentu model yang akan dipilih dalam penelitian ini.

Tabel 4.3 – Uji Hausman

Test Summary	Prob.
<i>Cross-section random</i>	0,1192

Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

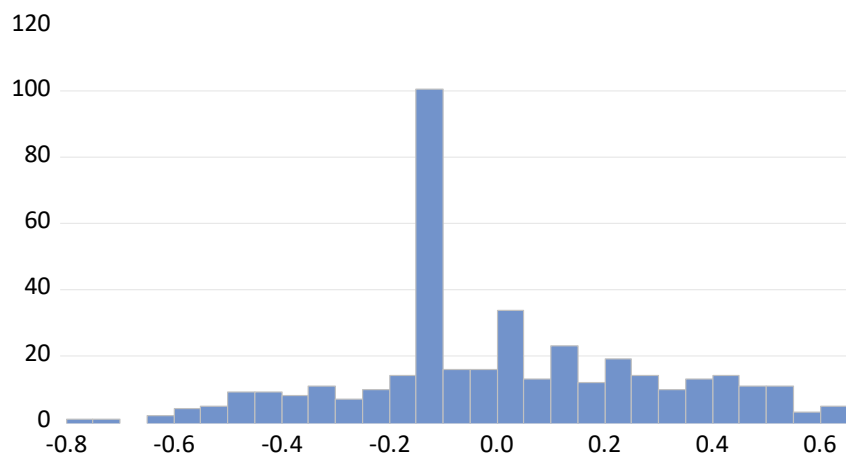
Uji hausman menunjukkan nilai probabilitas dari *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* sebesar $0,1192 > 0,05$, dengan keputusan H0 diterima, sehingga model regresi yang dipilih adalah RE. Karena model CE sudah ditolak pada pengujian pertama, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah RE.

4.3. Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk menguji kenormalan pada variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 4.1 – Histogram Uji Normalitas



Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Tabel 4.4 – Uji Normalitas

<i>Probability</i>	0,2427
--------------------	--------

Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 dan tabel 4.4, menunjukkan bahwa variabel independen maupun dependen sudah terdistribusi secara normal, karena probabilitas lebih dari 0,05, yaitu 0,2427.

4.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau korelasi antar variabel independen. Uji

multikolinieritas bisa dilakukan apabila memiliki lebih dari satu variabel independen.

Tabel 4.5 – Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Centered VIF</i>
Ukuran pemerintah daerah	1,599200
Rasio kemandirian	2,192466
Temuan audit	1,489536

Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa:

1. Ukuran pemerintah daerah (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,599. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang dimiliki menyatakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF $1,599 < 10$.
2. Rasio kemandirian (X2) memiliki nilai VIF sebesar 2,192. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang dimiliki menyatakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF $2,192 < 10$.
3. Temuan audit (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,489. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang dimiliki menyatakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF $1,489 < 10$.

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varians yang terjadi dalam model regresi. Heteroskedastisitas terjadi ketika terdapat ketidaksamaan atau perbedaan dari pengamatan

varian yang satu dengan yang lain, sedangkan jika tidak terdapat ketidaksamaan atau tetap maka disebut homoskedastisitas.

Tabel 4.6 – Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Prob.
Ukuran pemerintah daerah	0,0049
Rasio kemandirian	0,9095
Temuan audit	0,7675

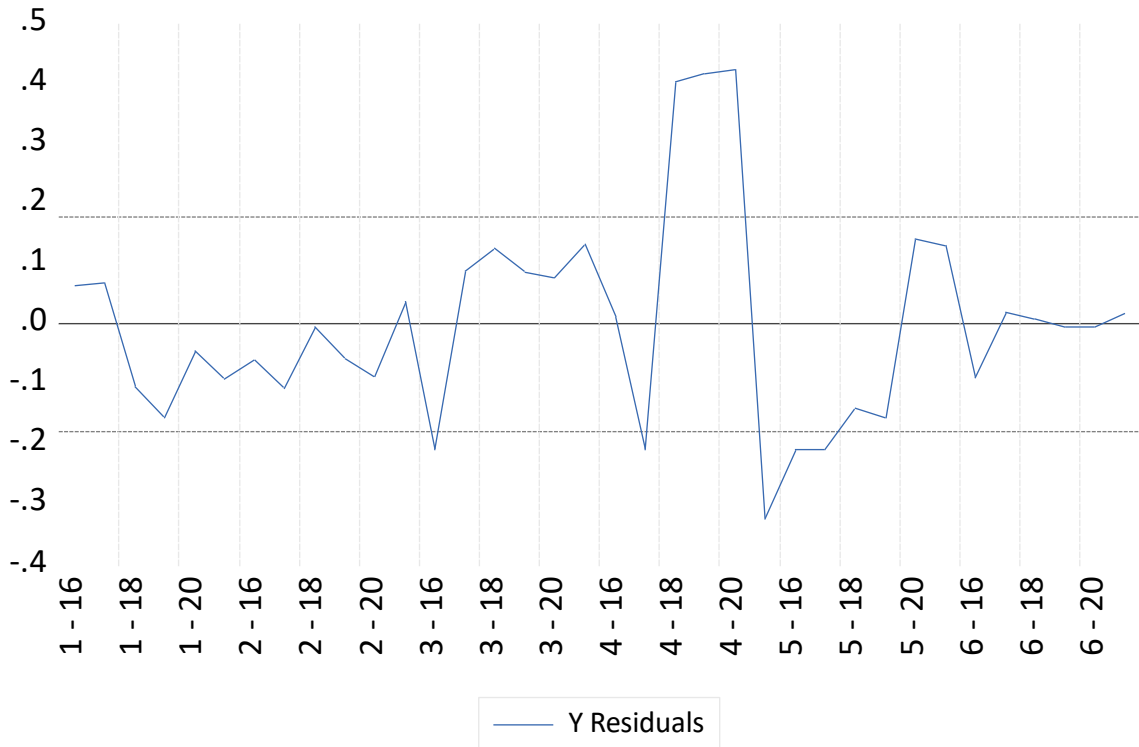
Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa:

1. Ukuran pemerintah (X1) memiliki nilai Prob. sebesar 0,0049. Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada data, atau tidak terdapat homoskedastisitas, karena $0,0049 < 0,05$.
2. Rasio kemandirian (X2) memiliki nilai Prob. sebesar 0,9095. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data, atau terdapat homoskedastisitas, karena $0,9095 > 0,05$.
3. Temuan audit (X3) memiliki nilai Prob. sebesar 0,7675. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada data, atau terdapat homoskedastisitas, karena $0,7675 > 0,05$.

Karena ukuran pemerintah daerah (X1) terdapat gejala heteroskedastisitas pada data, maka pengujian dilanjutkan dengan grafik residual.

Gambar 4.2 – Grafik Residual



Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Dalam gambar 4.1 memperlihatkan bahwa grafik tidak melewati 500 dan -500, artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedasitas atau lolos uji heteroskedasitas (Napitupulu dkk, 2021).

4.4. Uji Hipotesis

4.4.1. Persamaan Regresi

Analisis regresi data panel digunakan untuk memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section* maupun *time series*. Persamaan untuk regresi data panel dalam penelitian ini:

$$Y = 0,2077 + 6,2908 * X1 + 0,8776 * X2 - 0,0023 * X3$$

Dari persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa:

Konstanta	= 0,2077
Koefisien Regresi Ukuran Pemerintah Daerah	= 6,2908
Koefisien Regresi Rasio kemandirian	= 0,8776
Koefisien Regresi Temuan audit	= 0,0023

4.4.2. Uji t

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan temuan audit sebagai variabel independen terhadap variabel transparansi laporan keuangan sebagai variabel independen.

Tabel 4.7 – Uji t

Variabel	<i>t-Statistic</i>	Prob.
Ukuran pemerintah daerah	6,517663	0,0000
Rasio kemandirian	2,662556	0,0120
Temuan audit	-0,535813	0,5958

Sumber: Output eViews 12 yang sudah diolah, 2025

Dari hasil uji t yang terlihat pada tabel diatas dapat diketahui informasi mengenai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah (X1) terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Berdasarkan hasil olah data, nilai *t-Statistic* sebesar 6,5176 yang lebih besar dari t-tabel, 1,9660, menunjukkan adanya pengaruh

positif dan nilai probabilitas 0,0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2018), Trisnawati & Achmad (2014), Rahman dkk (2013).

Ukuran pemerintah daerah yang tinggi memunculkan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempublikasikan laporan keuangan daerah sehingga transparansi juga menjadi tinggi. Pemerintah daerah yang besar biasanya memiliki kecenderungan yang lebih kompleks dalam pengelolaan keuangan, sehingga pengawasan yang dilakukan juga akan lebih ketat. Pelaporan informasi keuangan yang lebih rinci dan pengawasan yang lebih ketat menjadi bukti adanya tekanan yang dihadapi pemerintah daerah selaku agen dalam mendelegasikan wewenang yang sudah diberikan oleh masyarakat selaku prinsipal agar wewenang tersebut dapat dinilai baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dan legitimasi institusional.

Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam mendelegasikan ukuran pemerintah daerah dalam bentuk total aset sudah dilakukan dengan baik dengan adanya transparansi laporan pemerintah keuangan daerah. Dari sisi teoritis, pada tahun 2016 sampai 2021, pemerintah daerah sudah

mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat dalam pengelolaan ukuran pemerintah daerah dalam bentuk aset. Hasil penilaian ini dapat dijadikan contoh serta pembelajaran bahwa penanganan dalam ukuran pemerintahan daerah masih dapat ditingkatkan dan diperbaiki lagi agar untuk tahun-tahun selanjutnya dapat dipertahankan bahkan dapat dinilai lebih baik lagi oleh masyarakat.

2. Pengaruh rasio kemandirian (X2) terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Berdasarkan hasil olah data, nilai *t-Statistic* sebesar 2,6625 yang lebih besar dari *t-tabel*, 1,9660, menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai probabilitas 0,0120, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dezalinda & Afriyenti (2024), Medina (2012), Dwirandra (2008).

Rasio kemandirian yang digambarkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yang menandakan bahwa rasio kemandirian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah

dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori keagenan dan legitimasi institusional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah sudah direalisasikan sebaik mungkin dan seefektif mungkin sesuai dengan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah dalam wujud laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Sedangkan dari sisi teoritis, hasil ini dapat digunakan untuk pembelajaran agar rasio kemandirian dapat ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat akan lebih percaya dan menilai baik pemerintah daerah.

3. Pengaruh temuan audit (X3) terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (Y)

Berdasarkan hasil olah data, nilai *t-Statistic* sebesar -0,5358 yang lebih kecil dari *t*-tabel, 1,9660, menunjukkan tidak adanya pengaruh dan nilai probabilitas 0,5958, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Hasil dari penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Waliyyani & Mahmud (2015), Trisnawati & Achmad (2014), Hilmi & Martani (2012).

Temuan audit digunakan sebagai salah satu sarana penilaian dalam mengetahui apakah terdapat ketidaksesuaian dalam

pelaporan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini digunakan untuk membantu penilaian masyarakat dalam mengetahui kinerja pemerintahan daerah. Laporan ini juga digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori agensi dan legitimasi institusional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini mungkin terjadi karena pengukuran yang hanya menggunakan jumlah temuan audit saja, terlebih dalam penelitian ini tidak membedakan temuan audit positif maupun negatif sehingga kurang sesuai. Jumlah temuan yang banyak belum tentu bernilai material, sehingga tidak mempresentasikan nilai yang sebenarnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan 396 sampel yang terdiri dari 66 kabupaten/kota dari tahun 2016-2021, didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan ini diambil berdasarkan nilai *t-Statistic* sebesar 6,5176 yang lebih besar dari *t*-tabel, 1,9660, menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai probabilitas 0,0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.
2. Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan ini diambil berdasarkan nilai *t-Statistic* sebesar 2,6625 yang lebih besar dari *t*-tabel, 1,9660, menunjukkan adanya pengaruh positif dan nilai probabilitas 0,0120, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.
3. Temuan audit tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan ini diambil berdasarkan nilai *t-Statistic* sebesar -0,5358 yang lebih besar dari *t*-tabel, 1,9660, menunjukkan tidak adanya pengaruh dan nilai probabilitas 0,5958, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian saat ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kesulitan mendapatkan data LKPD di situs pemerintah mengakibatkan data yang didapatkan peneliti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.
2. Penelitian ini hanya menggunakan ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan temuan audit sebagai variabel, sedangkan selain ketiga variabel tersebut masih terdapat alat ukur lain seperti kompetisi politik dan diferensiasi fungsional.

5.3.Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Saran untuk Pemerintah

Peneliti menyarankan agar peningkatan transparansi laporan keuangan daerah di setiap situs daerah dilakukan. Peningkatan transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kinerja pemerintah. Selain itu, disarankan pula keterbukaan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, termasuk untuk beberapa tahun terakhir.

2. Saran untuk Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel maupun alat pengujian lain untuk melakukan pengujian, seperti menggunakan kompetisi politik dan diferensiasi fungsional. Penelitian selanjutnya juga dapat memisahkan temuan audit yaitu temuan positif dan temuan negatif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan waktu terbaru dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, S. (2025). *Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, KPK Sita Tanah dan Apartemen Senilai Rp 8,1 M*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-korupsi-dana-hibah-jatim-kpk-sita-tanah-dan-apartemen-senilai-rp-8-1-m-1193094>
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Afryansyah, R. D., & Haryanto. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ansofino, Joliansis, Yolamanlinda, H. A. (2016). *Buku Ajar Ekonomika*. Deepublish.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (14th ed.). Rineka Cipta.
- Badjuri, A., & Trihapsari, E. (2004). Audit Kinerja pada Organisasi Sektor Publik Pemerintah. *Fokus Ekonomi*, 3(2), 10.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to Create a

- Culture of Transparency: E-government and Social Media as Openness and Anti-corruption Tools for Societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). Firms' Disclosure Reactions to Major Social Incidents: Australian Evidence. *Accounting Forum*, 24(1), 101–130. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00031>
- Deegan, C., & Unerman, J. (2011). *Financial Accounting Theory* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dezalinda, S., & Afriyenti, M. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Kompleksitas Pemerintahan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Daerah Via Website. *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(2), 540–550. <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i1.4757>
- Dhevina, I. (2018). *E-Government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi
- DiMaggio, P., & Powell, W. (2015). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields. *Administrative Science Quarterly*, 47(2), 364.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1388226>

- Dwirandra, A. A. N. B. (2008). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar*, 1–21.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2592/1804>
- Falkman, P., & Tagesson, T. (2008). Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal accounting. *Scandinavian Journal of Management*, 24(3), 271–283.
<https://doi.org/10.1016/j.scaman.2008.02.004>
- GFOA. (2018). *Website Posting of Financial Documents*. Gfoa.Org.
<https://www.gfoa.org/materials/website-posting-financial-documents>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
https://www.researchgate.net/publication/301199668_Aplikasi_Analisis_Multivariete_SPSS_23
- Handayani, S. (2010). Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi*, VII(2), 143–154.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008*

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Indonesia, R. (2012). *Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.*

<https://keuda.kemendagri.go.id/produkhukum/download/791/inmendagri-18852-1797-sj-2012>

Indonesia, R. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*

[https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU Nomor 23 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28013/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202014.pdf)

International, T. (2023). *Corruption Perceptions Index*. Transparency

International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index/idn>

Keuangan, D. J. P. (2023). Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah.

In Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Vol. 40, Issue 2023).

<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/08/LPEFD-XXIX.pdf>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Statistik TPK Berdasarkan Wilayah.

Kpk.Go.Id, 58. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>

Kristiani, I. (2020). *Anti Korupsi: Berbudaya Melalui Transparansi.*

Djpb.Kemenkeu.Go.Id. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/ketapang/id/data-publikasi/berita-terbaru/3075-anti-korupsi-berbudaya-melalui-transparansi.html>

Kurniawan, H. A. U. S. C. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54–70.
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/modus/article/view/1587>

Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). UPP STM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru* (Mardiasmo (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi.
https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Margono, S. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (5th ed.). Jakarta Rineka Cipta.

Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Website Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Universitas Indonesia.

- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS - Data - Eviews*.
- Pina, V., Torres, L., & Royo, S. (2010). Is E-government Promoting Convergence Towards More Accountable Local Governments? *International Public Management Journal*, 13(4), 350–380.
<https://doi.org/10.1080/10967494.2010.524834>
- Piotrowski, S. ., & Bartelli, A. (2010). *Measuring Municipal Transparency*.
- Priyambodo, V. K., Rizki, N., & Sukma, P. (2023). Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Situs Web. *Jurnal Risma*, 3(2), 106–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.689>
- Putri, R. A. R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
<https://doi.org/2460-0585>
- Rahman, A., Sutaryo, & Budiarmanto, A. (2013). Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, 1299–1323.
- Rainer, P. (2023). *Distribusi Penduduk Indonesia Berdasarkan Pulau/Area*. Good Stats. <https://data.goodstats.id/statistic/distribusi-penduduk-indonesia-berdasarkan-pulauarea-sKtCH>

- Robbins, P., S., & Judge, T. A. (2016). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sapitri, W., & Arza, F. I. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Nusantara Karya Akuntansi*, 2(3), 339–352.
<https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka/article/download/58/47/>
- Schnackenberg, A. K., & Tomlinson, E. C. (2016). Organization Transparency: A New Perspective on Managing Trust in Organization. *Journal of Management*, 42(7), 1784–1810.
https://www.researchgate.net/publication/275441822_Organizational_Transparency_A_New_Perspective_on_Managing_Trust_in_Organization-Stakeholder_Relationships
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Sinaga, Y. F. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro.
- Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). The accessibility of financial reporting of US municipalities on the internet. *J. Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 19(1), 56–92.

- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, & Wiratna, V. (2007). *Panduan Mudah Menggunakan SPSS dan Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*. Ardana Media.
- Sutopo, Y., & Slamet, A. (2017). *Statistika Inferensial* (Giovanny (ed.); 1st ed.). Penerbit Andi.
<https://books.google.co.id/books?id=jVJLDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 23.
- University, B. (2021). *Memahami Uji Autokorelasi dalam Model Regresi*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-autokorelasi-dalam-model-regresi/>
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj/article/view/7815>
- Winangsih, A., & Fathah, R. N. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pada Website Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(8), 3299–3309. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/1952/1600/3729>

Yu, H. (2010). On the Determinants of Internet-based Disclosure of Government Financial Information. *2010 International Conference on Management and Service Science*, 4. <https://doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5576822>

Zaenuddin, M. (2015). *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian dan Kebijakan Publik*. Deepublish.

Zimmerman, J. L. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15(1977), 107–144. <https://doi.org/10.2307/2490637>

LAMPIRAN 1

VARIABEL DEPENDEN DAN INDEPENDEN

Daerah	Tahun	Transparansi	Ukuran	Rasio Kemandirian	Temuan Audit
Jakarta	2016	100.00%	Rp4,822,611,461,066.69	58.78%	39
Jakarta	2017	100.00%	Rp5,450,238,298,390.07	56.31%	49
Jakarta	2018	100.00%	Rp6,136,887,781,642.47	70.75%	48
Jakarta	2019	100.00%	Rp6,525,736,823,289.67	73.37%	46
Jakarta	2020	100.00%	Rp6,405,827,985,374.84	66.95%	66
Jakarta	2021	100.00%	Rp6,600,577,546,004.91	63.46%	38
Bandung	2016	85.71%	Rp8,953,457,254,280.84	18.59%	7
Bandung	2017	85.71%	Rp9,662,590,831,208.72	18.44%	6
Bandung	2018	100.00%	Rp10,429,388,051,099.90	17.63%	6
Bandung	2019	100.00%	Rp11,263,980,756,266.30	17.89%	7
Bandung	2020	100.00%	Rp11,796,177,481,817.70	19.07%	13
Bandung	2021	100.00%	Rp12,340,924,893,408.20	1.91%	17
Karawang	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Karawang	2017	85.71%	Rp4,489,084,553,295.65	33.74%	8
Karawang	2018	85.71%	Rp4,832,949,592,660.38	27.92%	11
Karawang	2019	85.71%	Rp5,354,357,417,461.18	28.99%	12
Karawang	2020	85.71%	Rp5,524,923,223,443.92	29.80%	16
Karawang	2021	100.00%	Rp6,301,830,965,643.43	33.36%	13
Kuningan	2016	42.86%	Rp2,175,278,082,540.00	9.69%	5
Kuningan	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kuningan	2018	85.71%	Rp2,297,683,141,885.71	11.99%	2

Kuningan	2019	85.71%	Rp2,383,476,298,067.13	10.97%	6
Kuningan	2020	85.71%	Rp2,649,173,155,270.54	10.76%	15
Kuningan	2021	14.29%	Rp2,800,682,920,021.51	12.38%	11
Purwakarta	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purwakarta	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purwakarta	2018	38.10%	Rp2,755,764,325,350.00	17.90%	8
Purwakarta	2019	38.10%	Rp2,718,473,769,472.00	19.37%	5
Purwakarta	2020	66.67%	Rp2,920,616,705,392.00	19.48%	16
Purwakarta	2021	66.67%	Rp2,765,751,203,977.00	21.46%	15
Tasikmalaya	2016	42.86%	Rp4,059,021,894,153.27	6.73%	2
Tasikmalaya	2017	57.14%	Rp3,951,254,416,183.68	12.10%	5
Tasikmalaya	2018	57.14%	Rp4,863,200,296,463.61	6.98%	5
Tasikmalaya	2019	57.14%	Rp5,191,376,221,321.44	7.52%	11
Tasikmalaya	2020	57.14%	Rp5,066,885,554,511.19	8.51%	11
Tasikmalaya	2021	57.14%	Rp4,709,417,259,624.69	8.48%	11
Kota Bekasi	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Bekasi	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Bekasi	2018	57.14%	Rp11,707,468,561,698.60	41.38%	7
Kota Bekasi	2019	57.14%	Rp13,504,843,694,600.00	40.95%	5
Kota Bekasi	2020	57.14%	Rp14,486,406,301,265.20	40.24%	12
Kota Bekasi	2021	85.71%	Rp15,153,838,224,882.60	43.98%	19
Kota Bogor	2016	85.71%	Rp7,765,922,568,558.55	36.42%	6
Kota Bogor	2017	85.71%	Rp7,993,898,200,465.57	42.73%	4
Kota Bogor	2018	85.71%	Rp8,134,004,234,559.65	39.17%	10
Kota Bogor	2019	100.00%	Rp8,450,865,944,760.55	39.69%	6
Kota Bogor	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

Kota Bogor	2021	14.29%	Rp9,913,070,916,181.37	40.66%	12
Kota Depok	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Depok	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Depok	2018	100.00%	Rp10,190,832,640,978.70	36.04%	5
Kota Depok	2019	100.00%	Rp12,066,798,550,548.30	39.95%	4
Kota Depok	2020	100.00%	Rp14,128,331,630,657.00	39.71%	11
Kota Depok	2021	85.71%	Rp15,794,807,979,868.00	45.26%	9
Kota Tasikmalaya	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Tasikmalaya	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Tasikmalaya	2018	57.14%	Rp3,251,943,587,128.40	14.45%	5
Kota Tasikmalaya	2019	57.14%	Rp3,544,157,788,466.66	15.07%	10
Kota Tasikmalaya	2020	57.14%	Rp3,678,941,346,293.71	17.85%	8
Kota Tasikmalaya	2021	57.14%	Rp3,835,441,937,661.39	21.92%	15
Banjarnegara	2016	42.86%	Rp3,764,999,667,285.05	12.04%	7
Banjarnegara	2017	42.86%	Rp4,126,775,235,841.36	13.72%	4
Banjarnegara	2018	42.86%	Rp4,355,751,220,425.70	11.38%	10
Banjarnegara	2019	42.86%	Rp4,469,370,847,873.06	12.24%	4
Banjarnegara	2020	42.86%	Rp4,528,919,724,975.62	11.96%	4
Banjarnegara	2021	42.86%	Rp4,611,184,734,617.03	15.04%	9
Banyumas	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Banyumas	2017	57.14%	Rp5,463,777,382,017.12	19.24%	8
Banyumas	2018	57.14%	Rp6,419,865,052,453.72	19.85%	7
Banyumas	2019	100.00%	Rp6,226,652,415,512.68	19.99%	7
Banyumas	2020	100.00%	Rp6,540,515,839,032.71	20.07%	12
Banyumas	2021	100.00%	Rp7,258,283,031,630.04	21.85%	10
Batang	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

Batang	2017	66.67%	Rp2,403,414,307,811.48	14.03%	11
Batang	2018	9.52%	Rp2,511,746,350,765.55	13.96%	12
Batang	2019	66.67%	Rp2,664,373,528,271.74	13.89%	4
Batang	2020	66.67%	Rp2,909,762,489,944.75	14.85%	13
Batang	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Blora	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Blora	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Blora	2018	57.14%	Rp2,916,854,233,298.52	9.58%	7
Blora	2019	57.14%	Rp3,362,562,896,873.61	11.02%	11
Blora	2020	28.57%	Rp3,382,901,824,152.56	14.08%	10
Blora	2021	100.00%	Rp3,536,211,050,648.78	14.67%	5
Boyolali	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Boyolali	2017	42.86%	Rp2,613,993,025,493.86	17.83%	12
Boyolali	2018	28.57%	Rp3,116,090,963,844.90	15.39%	8
Boyolali	2019	14.29%	Rp3,770,144,077,202.44	16.77%	4
Boyolali	2020	100.00%	Rp4,227,690,989,734.95	18.95%	8
Boyolali	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Brebes	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Brebes	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Brebes	2018	14.29%	Rp3,366,883,430,103.07	12.15%	10
Brebes	2019	85.71%	Rp4,187,462,596,274.54	12.24%	5
Brebes	2020	100.00%	Rp3,740,761,434,711.88	13.05%	9
Brebes	2021	100.00%	Rp3,838,478,619,191.23	16.40%	11
Cilacap	2016	14.29%	Rp4,019,210,952,135.73	15.33%	11
Cilacap	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Cilacap	2018	14.29%	Rp4,590,474,285,434.40	17.17%	5

Cilacap	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Cilacap	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Cilacap	2021	100.00%	Rp6,345,078,297,174.14	22.17%	8
Demak	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Demak	2017	66.67%	Rp4,927,032,170,221.45	15.02%	7
Demak	2018	66.67%	Rp5,084,647,496,851.59	15.97%	7
Demak	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Demak	2020	66.67%	Rp2,697,120,718,057.40	18.84%	4
Demak	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Jepara	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Jepara	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Jepara	2018	100.00%	Rp6,132,256,105,265.02	16.37%	8
Jepara	2019	100.00%	Rp6,496,679,937,376.67	15.95%	6
Jepara	2020	100.00%	Rp6,626,878,048,524.50	18.11%	9
Jepara	2021	100.00%	Rp6,674,428,413,014.89	17.16%	4
Karanganyar	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Karanganyar	2017	9.52%	Rp2,916,448,443,711.43	20.32%	8
Karanganyar	2018	9.52%	Rp3,190,931,038,152.83	16.23%	4
Karanganyar	2019	66.67%	Rp3,476,942,970,374.69	17.79%	5
Karanganyar	2020	9.52%	Rp4,422,303,404,841.81	18.13%	9
Karanganyar	2021	57.14%	Rp4,882,484,122,308.37	19.70%	6
Klaten	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Klaten	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Klaten	2018	14.29%	Rp4,001,324,130,418.45	15.36%	9
Klaten	2019	100.00%	Rp4,157,398,988,909.00	11.59%	5
Klaten	2020	100.00%	Rp3,566,777,871,038.34	12.80%	11

Klaten	2021	100.00%	Rp3,515,210,592,463.72	12.27%	4
Kudus	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kudus	2017	100.00%	Rp3,019,208,420,028.09	184.67%	15
Kudus	2018	100.00%	Rp4,159,213,413,942.49	16.90%	5
Kudus	2019	100.00%	Rp4,468,531,280,044.62	16.45%	4
Kudus	2020	100.00%	Rp4,670,496,301,414.84	19.04%	13
Kudus	2021	100.00%	Rp4,850,177,079,997.88	23.44%	6
Magelang	2016	100.00%	Rp5,620,068,520,753.58	14.17%	11
Magelang	2017	85.71%	Rp6,006,822,341,817.70	17.77%	10
Magelang	2018	85.71%	Rp3,141,760,777,818.53	14.12%	6
Magelang	2019	100.00%	Rp3,270,629,440,572.02	16.20%	3
Magelang	2020	100.00%	Rp3,429,577,837,888.45	13.85%	11
Magelang	2021	71.43%	Rp3,597,390,329,880.28	15.20%	8
Pati	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Pati	2017	100.00%	Rp6,006,822,341,817.70	16.24%	9
Pati	2018	66.67%	Rp6,190,923,149,283.96	13.77%	7
Pati	2019	100.00%	Rp6,439,754,615,979.58	12.82%	3
Pati	2020	100.00%	Rp6,254,897,635,666.18	13.96%	17
Pati	2021	100.00%	Rp6,356,447,372,037.16	14.26%	5
Pekalongan	2016	66.67%	Rp2,166,875,317,645.29	17.38%	9
Pekalongan	2017	100.00%	Rp2,469,666,568,415.46	14.77%	5
Pekalongan	2018	100.00%	Rp2,763,481,985,690.28	14.81%	7
Pekalongan	2019	100.00%	Rp3,020,680,906,818.08	15.64%	7
Pekalongan	2020	66.67%	Rp3,066,064,901,782.83	16.58%	5
Pekalongan	2021	100.00%	Rp3,140,697,646,888.52	16.68%	6
Pemalang	2016	57.14%	Rp2,973,662,409,896.19	12.98%	5

Pemalang	2017	66.67%	Rp3,227,551,323,034.14	18.10%	11
Pemalang	2018	28.57%	Rp3,512,512,785,581.85	12.37%	8
Pemalang	2019	28.57%	Rp3,786,927,056,410.92	13.30%	3
Pemalang	2020	66.67%	Rp3,803,001,551,340.07	13.41%	9
Pemalang	2021	47.62%	Rp3,889,677,659,868.34	14.03%	6
Purbalingga	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purbalingga	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purbalingga	2018	66.67%	Rp2,621,915,743,198.10	14.51%	6
Purbalingga	2019	9.52%	Rp2,846,328,687,092.87	14.74%	4
Purbalingga	2020	66.67%	Rp2,769,994,111,890.32	16.06%	12
Purbalingga	2021	66.67%	Rp2,857,441,202,742.83	18.39%	7
Purworejo	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purworejo	2017	85.71%	Rp2,588,956,121,375.38	14.12%	5
Purworejo	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Purworejo	2019	100.00%	Rp2,987,231,520,048.19	12.91%	5
Purworejo	2020	100.00%	Rp3,108,457,930,732.89	14.07%	5
Purworejo	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Rembang	2016	14.29%	Rp1,799,809,861,544.76	14.96%	5
Rembang	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Rembang	2018	14.29%	Rp2,083,375,254,651.96	16.61%	10
Rembang	2019	100.00%	Rp2,143,033,080,689.93	16.05%	6
Rembang	2020	57.14%	Rp2,346,462,043,810.98	17.39%	7
Rembang	2021	57.14%	Rp2,504,076,268,459.96	21.14%	5
Sragen	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Sragen	2017	57.14%	Rp2,906,083,541,960.67	18.50%	10
Sragen	2018	38.10%	Rp3,374,697,292,758.05	15.36%	5

Sragen	2019	38.10%	Rp3,941,848,384,832.37	16.01%	6
Sragen	2020	66.67%	Rp4,087,577,565,236.06	17.83%	10
Sragen	2021	28.57%	Rp4,223,594,001,345.34	22.99%	7
Sukoharjo	2016	28.57%	Rp4,110,568,092,019.23	18.80%	4
Sukoharjo	2017	28.57%	Rp4,503,212,327,840.72	22.60%	10
Sukoharjo	2018	66.67%	Rp4,738,164,776,816.97	21.09%	6
Sukoharjo	2019	66.67%	Rp5,194,655,435,894.62	21.40%	3
Sukoharjo	2020	100.00%	Rp5,674,969,987,939.30	23.01%	12
Sukoharjo	2021	66.67%	Rp6,298,329,078,066.73	24.93%	11
Tegal	2016	57.14%	Rp2,795,204,576,012.50	14.62%	6
Tegal	2017	66.67%	Rp2,991,069,237,986.63	15.32%	8
Tegal	2018	100.00%	Rp3,184,190,479,588.44	14.75%	8
Tegal	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tegal	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tegal	2021	57.14%	Rp3,840,424,064,103.19	20.65%	10
Temanggung	2016	66.67%	Rp2,765,376,607,594.51	16.76%	6
Temanggung	2017	100.00%	Rp2,943,103,837,806.72	17.33%	5
Temanggung	2018	100.00%	Rp3,104,748,410,142.86	14.56%	5
Temanggung	2019	100.00%	Rp3,240,096,678,946.35	14.82%	8
Temanggung	2020	100.00%	Rp3,184,697,915,399.87	16.79%	11
Temanggung	2021	100.00%	Rp3,420,435,895,674.96	18.42%	11
Wonogiri	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Wonogiri	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Wonogiri	2018	38.10%	Rp3,441,897,165,791.76	11.71%	11
Wonogiri	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Wonogiri	2020	76.19%	Rp3,821,069,295,193.67	12.06%	5

Wonogiri	2021	57.14%	Rp3,911,948,544,251.81	10.48%	5
Kota Magelang	2016	100.00%	Rp2,920,893,584,607.44	26.23%	8
Kota Magelang	2017	57.14%	Rp3,579,209,910,129.97	25.68%	4
Kota Magelang	2018	66.67%	Rp3,865,401,096,564.41	27.52%	6
Kota Magelang	2019	66.67%	Rp4,012,816,686,651.14	28.27%	1
Kota Magelang	2020	38.10%	Rp4,160,262,610,517.38	30.73%	12
Kota Magelang	2021	47.62%	Rp4,337,393,562,510.68	32.12%	10
Kota Pekalongan	2016	47.62%	Rp2,177,047,983,429.69	20.83%	7
Kota Pekalongan	2017	38.10%	Rp2,311,166,310,884.34	20.96%	8
Kota Pekalongan	2018	66.67%	Rp2,463,049,418,792.98	19.80%	7
Kota Pekalongan	2019	57.14%	Rp2,856,674,222,675.30	21.90%	5
Kota Pekalongan	2020	66.67%	Rp2,921,917,451,388.13	24.58%	4
Kota Pekalongan	2021	57.14%	Rp3,048,941,837,080.65	26.08%	12
Kota Salatiga	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Salatiga	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Salatiga	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Salatiga	2019	14.29%	Rp3,072,155,684,616.59	25.44%	3
Kota Salatiga	2020	14.29%	Rp3,122,697,428,676.77	24.66%	13
Kota Salatiga	2021	100.00%	Rp3,200,391,773,223.50	29.66%	9
Kota Semarang	2016	14.29%	Rp28,793,140,180,037.00	36.35%	13
Kota Semarang	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Semarang	2018	100.00%	Rp30,970,860,367,210.00	43.01%	8
Kota Semarang	2019	100.00%	Rp18,159,413,566,476.00	45.26%	9
Kota Semarang	2020	66.67%	Rp21,003,912,081,270.80	46.01%	16
Kota Semarang	2021	66.67%	Rp21,533,658,423,314.90	49.47%	17
Bantul	2016	28.57%	Rp3,030,547,431,031.26	20.22%	6

Bantul	2017	28.57%	Rp3,045,637,995,200.45	23.66%	8
Bantul	2018	28.57%	Rp3,255,020,103,752.85	20.77%	5
Bantul	2019	42.86%	Rp3,446,419,741,778.31	22.29%	4
Bantul	2020	42.86%	Rp3,482,512,042,294.68	22.79%	10
Bantul	2021	85.71%	Rp3,618,472,212,604.41	21.99%	8
Gunung Kidul	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Gunung Kidul	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Gunung Kidul	2018	66.67%	Rp2,846,345,700,156.11	12.26%	3
Gunung Kidul	2019	57.14%	Rp3,031,266,301,154.32	12.06%	5
Gunung Kidul	2020	66.67%	Rp3,205,281,832,835.73	12.73%	6
Gunung Kidul	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kulon Progo	2016	14.29%	Rp1,625,139,115,945.57	13.27%	2
Kulon Progo	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kulon Progo	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kulon Progo	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kulon Progo	2020	66.67%	Rp2,358,800,577,637.48	16.08%	7
Kulon Progo	2021	66.67%	Rp2,501,713,544,232.27	18.85%	6
Sleman	2016	100.00%	Rp3,950,817,248,484.86	30.79%	7
Sleman	2017	100.00%	Rp4,106,625,138,726.42	31.57%	5
Sleman	2018	100.00%	Rp4,537,884,982,107.18	32.97%	5
Sleman	2019	100.00%	Rp4,889,673,225,382.27	34.22%	4
Sleman	2020	100.00%	Rp5,059,678,892,687.95	32.16%	5
Sleman	2021	100.00%	Rp5,820,090,126,338.47	28.77%	5
Gresik	2016	100.00%	Rp4,877,773,576,631.62	28.37%	7
Gresik	2017	71.43%	Rp4,984,572,804,346.89	31.78%	7
Gresik	2018	85.71%	Rp5,929,674,460,563.16	33.28%	7

Gresik	2019	100.00%	Rp6,306,091,367,346.14	31.44%	3
Gresik	2020	100.00%	Rp6,219,174,906,927.20	31.46%	13
Gresik	2021	100.00%	Rp6,193,948,015,545.13	32.91%	8
Lamongan	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Lamongan	2017	14.29%	Rp4,168,959,964,408.15	15.80%	6
Lamongan	2018	14.29%	Rp5,058,850,989,440.96	15.53%	8
Lamongan	2019	14.29%	Rp5,359,757,062,703.33	16.48%	6
Lamongan	2020	14.29%	Rp5,414,658,472,857.71	16.97%	14
Lamongan	2021	100.00%	Rp5,689,396,549,755.05	20.32%	13
Lumajang	2016	100.00%	Rp2,194,277,106,621.17	13.14%	5
Lumajang	2017	100.00%	Rp2,430,593,260,202.58	16.58%	7
Lumajang	2018	100.00%	Rp2,385,355,101,451.39	13.00%	5
Lumajang	2019	100.00%	Rp2,394,009,524,655.36	13.56%	7
Lumajang	2020	100.00%	Rp2,514,794,540,106.72	14.17%	14
Lumajang	2021	100.00%	Rp2,788,996,536,860.88	15.04%	14
Madiun	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Madiun	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Madiun	2018	57.14%	Rp4,054,430,335,312.31	11.97%	5
Madiun	2019	100.00%	Rp4,162,865,455,741.13	11.77%	3
Madiun	2020	57.14%	Rp4,223,308,432,256.55	14.01%	8
Madiun	2021	42.86%	Rp4,637,395,032,456.17	16.84%	10
Magetan	2016	66.67%	Rp1,757,396,551,761.76	9.92%	9
Magetan	2017	66.67%	Rp1,946,729,068,306.53	12.11%	9
Magetan	2018	66.67%	Rp2,047,654,642,691.95	10.76%	4
Magetan	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Magetan	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

Magetan	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Pamekasan	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Pamekasan	2017	85.71%	Rp3,202,523,870,567.79	12.76%	11
Pamekasan	2018	100.00%	Rp3,483,606,764,607.15	12.08%	8
Pamekasan	2019	100.00%	Rp3,649,901,120,551.89	11.44%	7
Pamekasan	2020	100.00%	Rp3,721,643,174,886.75	12.73%	14
Pamekasan	2021	100.00%	Rp3,778,135,844,076.41	10.96%	12
Probolinggo	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Probolinggo	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Probolinggo	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Probolinggo	2019	85.71%	Rp2,441,287,793,527.01	10.20%	8
Probolinggo	2020	42.86%	Rp2,688,588,429,375.46	10.93%	15
Probolinggo	2021	28.57%	Rp3,112,795,766,025.52	12.52%	14
Sidoarjo	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Sidoarjo	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Sidoarjo	2018	42.86%	Rp17,377,441,188,340.00	38.90%	7
Sidoarjo	2019	42.86%	Rp20,794,692,034,467.40	38.02%	10
Sidoarjo	2020	85.71%	Rp21,264,200,469,428.10	40.77%	8
Sidoarjo	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Situbondo	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Situbondo	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Situbondo	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Situbondo	2019	28.57%	Rp3,679,611,549,365.70	11.25%	5
Situbondo	2020	42.86%	Rp4,211,724,139,658.96	12.39%	13
Situbondo	2021	85.71%	Rp4,466,844,477,361.35	13.05%	10
Trenggalek	2016	57.14%	Rp2,128,043,490,614.29	11.16%	12

Trenggalek	2017	57.14%	Rp2,220,438,863,559.53	14.13%	11
Trenggalek	2018	66.67%	Rp2,346,933,275,438.47	12.82%	4
Trenggalek	2019	66.67%	Rp2,412,125,612,364.07	14.32%	7
Trenggalek	2020	66.67%	Rp2,352,295,099,885.28	14.09%	11
Trenggalek	2021	57.14%	Rp2,662,665,506,348.75	12.55%	14
Tuban	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tuban	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tuban	2018	57.14%	Rp6,831,283,504,584.03	18.02%	4
Tuban	2019	57.14%	Rp7,141,285,838,190.56	19.55%	3
Tuban	2020	57.14%	Rp7,300,738,037,164.47	21.95%	10
Tuban	2021	57.14%	Rp7,673,202,987,339.55	22.82%	12
Kota Batu	2016	28.57%	Rp1,651,456,464,690.50	13.63%	6
Kota Batu	2017	28.57%	Rp1,744,494,745,415.07	17.59%	6
Kota Batu	2018	28.57%	Rp1,910,800,790,102.14	16.51%	5
Kota Batu	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Batu	2020	42.86%	Rp1,969,750,855,908.37	15.31%	18
Kota Batu	2021	28.57%	Rp1,957,746,217,629.29	15.16%	4
Kota Blitar	2016	28.57%	Rp2,228,582,896,965.28	15.57%	7
Kota Blitar	2017	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Blitar	2018	57.14%	Rp2,441,419,752,949.69	18.23%	9
Kota Blitar	2019	85.71%	Rp2,644,733,042,031.17	17.66%	8
Kota Blitar	2020	42.86%	Rp2,595,047,554,204.28	19.82%	5
Kota Blitar	2021	42.86%	Rp2,842,396,924,943.55	28.58%	9
Kota Madiun	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Madiun	2017	100.00%	Rp2,398,412,871,680.95	24.08%	5
Kota Madiun	2018	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

Kota Madiun	2019	85.71%	Rp2,658,741,300,273.45	24.23%	4
Kota Madiun	2020	100.00%	Rp2,748,491,955,577.70	23.49%	9
Kota Madiun	2021	100.00%	Rp2,825,866,797,765.40	24.16%	9
Kota Malang	2016	100.00%	Rp5,909,774,604,328.97	27.42%	5
Kota Malang	2017	100.00%	Rp6,126,978,363,673.12	29.83%	8
Kota Malang	2018	100.00%	Rp6,396,564,384,412.46	27.30%	9
Kota Malang	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Malang	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Malang	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Probolinggo	2016	28.57%	Rp1,496,043,374,917.81	19.33%	8
Kota Probolinggo	2017	14.29%	Rp1,592,418,090,129.47	22.39%	5
Kota Probolinggo	2018	42.86%	Rp1,681,778,008,505.24	17.80%	6
Kota Probolinggo	2019	85.71%	Rp1,688,836,085,886.70	18.27%	10
Kota Probolinggo	2020	85.71%	Rp1,795,835,839,578.07	19.92%	14
Kota Probolinggo	2021	85.71%	Rp1,865,800,687,948.79	21.42%	11
Kota Surabaya	2016	28.57%	Rp38,134,603,568,773.00	59.92%	8
Kota Surabaya	2017	28.57%	Rp41,176,250,937,330.60	64.25%	13
Kota Surabaya	2018	28.57%	Rp42,764,672,922,352.50	60.83%	7
Kota Surabaya	2019	28.57%	Rp44,693,653,396,745.60	61.40%	5
Kota Surabaya	2020	28.57%	Rp45,910,335,939,674.00	56.86%	11
Kota Surabaya	2021	28.57%	Rp47,023,936,026,338.00	56.77%	6
Lebak	2016	100.00%	Rp4,604,255,410,412.05	14.21%	8
Lebak	2017	100.00%	Rp4,375,606,505,872.09	24.08%	3
Lebak	2018	100.00%	Rp4,140,801,892,178.87	13.95%	3
Lebak	2019	100.00%	Rp4,265,888,913,428.26	12.50%	2
Lebak	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

Lebak	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Pandeglang	2016	100.00%	Rp2,505,560,894,342.41	8.99%	13
Pandeglang	2017	100.00%	Rp2,827,251,001,848.97	15.70%	5
Pandeglang	2018	100.00%	Rp2,920,488,816,249.31	8.34%	4
Pandeglang	2019	100.00%	Rp3,100,639,444,322.71	8.28%	4
Pandeglang	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Pandeglang	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Serang	2016	100.00%	Rp3,717,634,888,244.22	23.93%	8
Serang	2017	100.00%	Rp3,846,741,454,297.54	29.01%	7
Serang	2018	100.00%	Rp3,856,002,501,553.54	23.88%	5
Serang	2019	33.33%	Rp3,817,359,869,023.82	22.58%	8
Serang	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Serang	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Cilegon	2016	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Cilegon	2017	100.00%	Rp3,447,865,623,907.00	38.16%	3
Kota Cilegon	2018	100.00%	Rp4,520,506,103,109.00	35.48%	2
Kota Cilegon	2019	100.00%	Rp4,715,039,121,988.83	35.86%	6
Kota Cilegon	2020	100.00%	Rp5,033,721,428,189.74	40.73%	4
Kota Cilegon	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Kota Serang	2016	100.00%	Rp2,579,525,829,246.43	11.21%	10
Kota Serang	2017	100.00%	Rp2,208,934,685,576.36	18.88%	7
Kota Serang	2018	100.00%	Rp2,530,799,809,879.08	13.22%	4
Kota Serang	2019	100.00%	Rp2,890,976,547,098.36	14.16%	8
Kota Serang	2020	14.29%	Rp3,023,916,661,839.32	14.24%	11
Kota Serang	2021	100.00%	Rp3,363,401,600,196.55	14.06%	16
Kota Tangerang	2016	100.00%	Rp6,371,379,397,783.63	46.93%	10

Kota Tangerang	2017	100.00%	Rp7,580,528,269,909.29	50.68%	9
Kota Tangerang	2018	100.00%	Rp7,844,681,532,354.19	46.94%	4
Kota Tangerang	2019	100.00%	Rp8,195,102,854,924.88	47.39%	3
Kota Tangerang	2020	100.00%	Rp9,234,539,855,370.29	45.19%	9
Kota Tangerang	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tangerang Selatan	2016	100.00%	Rp18,271,462,377,991.20	50.53%	9
Tangerang Selatan	2017	100.00%	Rp19,138,345,302,900.90	54.06%	7
Tangerang Selatan	2018	100.00%	Rp20,358,502,058,443.60	50.50%	4
Tangerang Selatan	2019	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tangerang Selatan	2020	0.00%	Rp0.00	0.00%	0
Tangerang Selatan	2021	0.00%	Rp0.00	0.00%	0

LAMPIRAN 2
RASIO KEMANDIRIAN

Daerah	Tahun	PAD	Jumlah total pendapatan	Rasio kemandirian
Jakarta	2016	Rp31,613,197,534,662.00	Rp53,784,706,312,513.00	58.78%
Jakarta	2017	Rp36,500,782,266,176.00	Rp64,823,887,369,820.00	56.31%
Jakarta	2018	Rp43,327,136,602,811.00	Rp61,235,824,747,633.00	70.75%
Jakarta	2019	Rp45,707,400,003,802.00	Rp62,300,679,833,068.00	73.37%
Jakarta	2020	Rp37,414,754,711,193.00	Rp55,887,004,237,727.00	66.95%
Jakarta	2021	Rp41,606,307,405,630.00	Rp65,567,009,199,000.00	63.46%
Bandung	2016	Rp856,514,244,254.37	Rp4,607,699,372,893.37	18.59%
Bandung	2017	Rp936,905,730,680.24	Rp5,081,260,297,655.24	18.44%
Bandung	2018	Rp927,543,321,132.26	Rp5,259,974,811,369.26	17.63%
Bandung	2019	Rp1,025,354,252,357.57	Rp5,730,185,099,102.57	17.89%
Bandung	2020	Rp1,019,355,741,053.99	Rp5,345,992,773,326.99	19.07%
Bandung	2021	Rp1,095,969,843,556.02	Rp57,522,869,024,783.00	1.91%
Karawang	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Karawang	2017	Rp1,398,309,963,116.00	Rp4,144,829,706,439.00	33.74%
Karawang	2018	Rp1,169,569,261,195.82	Rp4,188,371,977,766.82	27.92%
Karawang	2019	Rp1,356,319,882,910.25	Rp4,678,932,470,058.25	28.99%
Karawang	2020	Rp1,303,353,416,438.35	Rp4,374,266,860,730.35	29.80%
Karawang	2021	Rp1,651,850,841,989.00	Rp4,951,680,888,844.00	33.36%
Kuningan	2016	Rp253,441,689,733.00	Rp2,616,709,699,944.00	9.69%
Kuningan	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%

Kuningan	2018	Rp303,218,052,849.00	Rp2,529,670,838,803.00	11.99%
Kuningan	2019	Rp301,403,914,672.00	Rp2,747,862,863,686.00	10.97%
Kuningan	2020	Rp298,726,080,629.00	Rp2,776,498,025,041.00	10.76%
Kuningan	2021	Rp343,864,589,959.00	Rp2,778,618,768,752.00	12.38%
Purwakarta	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purwakarta	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purwakarta	2018	Rp368,851,052,594.00	Rp2,060,677,874,221.00	17.90%
Purwakarta	2019	Rp420,353,733,502.00	Rp2,169,865,594,847.00	19.37%
Purwakarta	2020	Rp428,077,117,998.00	Rp2,197,597,078,808.00	19.48%
Purwakarta	2021	Rp515,746,568,984.00	Rp2,402,816,479,087.00	21.46%
Tasikmalaya	2016	Rp216,227,321,380.00	Rp3,213,253,773,821.00	6.73%
Tasikmalaya	2017	Rp401,502,016,966.00	Rp3,318,577,309,403.00	12.10%
Tasikmalaya	2018	Rp248,420,386,329.00	Rp3,557,974,395,890.00	6.98%
Tasikmalaya	2019	Rp288,290,693,896.00	Rp3,832,391,090,725.45	7.52%
Tasikmalaya	2020	Rp305,887,233,378.47	Rp3,593,434,008,351.47	8.51%
Tasikmalaya	2021	Rp275,030,394,259.50	Rp3,241,569,559,918.50	8.48%
Kota Bekasi	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Bekasi	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Bekasi	2018	Rp2,001,150,459,494.21	Rp4,835,980,257,174.21	41.38%
Kota Bekasi	2019	Rp2,442,151,873,746.89	Rp5,963,932,792,508.89	40.95%
Kota Bekasi	2020	Rp2,048,909,314,820.00	Rp5,092,165,753,501.00	40.24%
Kota Bekasi	2021	Rp2,536,707,290,387.00	Rp5,767,654,700,558.00	43.98%
Kota Bogor	2016	Rp783,873,587,219.00	Rp2,152,370,082,886.00	36.42%
Kota Bogor	2017	Rp978,197,741,947.33	Rp2,289,359,362,675.33	42.73%
Kota Bogor	2018	Rp912,197,971,288.85	Rp2,328,703,432,668.85	39.17%
Kota Bogor	2019	Rp1,015,884,216,919.86	Rp2,559,857,207,793.86	39.69%

Kota Bogor	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Bogor	2021	Rp1,075,240,926,213.11	Rp2,644,780,935,777.11	40.66%
Kota Depok	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Depok	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Depok	2018	Rp1,059,700,280,693.72	Rp2,940,266,487,078.72	36.04%
Kota Depok	2019	Rp1,293,003,769,037.00	Rp3,236,277,806,392.00	39.95%
Kota Depok	2020	Rp1,214,939,201,530.00	Rp3,059,775,185,315.00	39.71%
Kota Depok	2021	Rp1,536,968,635,023.00	Rp3,396,023,758,232.00	45.26%
Kota Tasikmalaya	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Tasikmalaya	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Tasikmalaya	2018	Rp280,014,887,927.09	Rp1,937,915,314,476.09	14.45%
Kota Tasikmalaya	2019	Rp290,971,707,718.47	Rp1,930,263,244,423.47	15.07%
Kota Tasikmalaya	2020	Rp314,307,017,302.25	Rp1,760,907,421,698.25	17.85%
Kota Tasikmalaya	2021	Rp445,335,320,092.00	Rp2,031,399,322,745.92	21.92%
Banjarnegara	2016	Rp221,048,387,512.00	Rp1,836,015,079,137.00	12.04%
Banjarnegara	2017	Rp297,485,382,003.00	Rp2,167,801,161,490.00	13.72%
Banjarnegara	2018	Rp235,994,436,137.00	Rp2,074,653,161,695.00	11.38%
Banjarnegara	2019	Rp257,700,650,110.00	Rp2,105,990,272,337.00	12.24%
Banjarnegara	2020	Rp238,638,994,321.00	Rp1,994,604,106,561.00	11.96%
Banjarnegara	2021	Rp313,830,623,336.00	Rp2,086,059,742,250.00	15.04%
Banyumas	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Banyumas	2017	Rp619,701,627,380.00	Rp3,221,258,052,894.00	19.24%
Banyumas	2018	Rp648,326,914,034.83	Rp3,265,926,651,860.83	19.85%
Banyumas	2019	Rp686,805,512,326.17	Rp3,434,925,995,303.17	19.99%
Banyumas	2020	Rp668,211,148,299.00	Rp3,330,186,788,242.00	20.07%
Banyumas	2021	Rp761,991,440,173.00	Rp3,487,722,900,410.00	21.85%

Batang	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Batang	2017	Rp219,807,128,306.58	Rp1,566,154,720,813.58	14.03%
Batang	2018	Rp237,547,973,048.00	Rp1,701,877,299,154.00	13.96%
Batang	2019	Rp245,836,087,092.28	Rp1,769,958,202,416.28	13.89%
Batang	2020	Rp257,422,866,095.46	Rp1,733,087,893,276.46	14.85%
Batang	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Blora	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Blora	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Blora	2018	Rp203,182,795,054.00	Rp2,120,671,434,967.00	9.58%
Blora	2019	Rp246,863,066,484.00	Rp2,240,970,020,181.00	11.02%
Blora	2020	Rp299,687,660,301.00	Rp2,127,946,961,535.00	14.08%
Blora	2021	Rp326,770,477,077.00	Rp2,227,065,270,461.00	14.67%
Boyolali	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Boyolali	2017	Rp388,014,897,386.00	Rp2,176,496,270,254.00	17.83%
Boyolali	2018	Rp342,957,213,726.00	Rp2,227,780,710,062.00	15.39%
Boyolali	2019	Rp395,431,863,402.00	Rp2,357,487,210,573.00	16.77%
Boyolali	2020	Rp451,543,582,894.00	Rp2,382,403,220,150.00	18.95%
Boyolali	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Brebes	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Brebes	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Brebes	2018	Rp346,907,972,510.31	Rp2,854,043,939,110.31	12.15%
Brebes	2019	Rp379,091,298,714.05	Rp3,096,826,845,150.05	12.24%
Brebes	2020	Rp392,541,730,819.14	Rp3,008,370,717,507.14	13.05%
Brebes	2021	Rp518,511,128,704.62	Rp3,162,140,424,371.62	16.40%
Cilacap	2016	Rp428,598,239,897.42	Rp2,796,010,344,654.42	15.33%
Cilacap	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%

Cilacap	2018	Rp527,577,740,281.47	Rp3,072,112,464,787.47	17.17%
Cilacap	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Cilacap	2020	Rp0.00	Rp0.00	
Cilacap	2021	Rp739,133,833,863.79	Rp3,334,300,290,655.79	22.17%
Demak	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Demak	2017	Rp309,612,407,201.00	Rp2,060,864,280,423.00	15.02%
Demak	2018	Rp342,324,870,245.00	Rp2,143,306,258,595.00	15.97%
Demak	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Demak	2020	Rp439,694,424,385.95	Rp2,333,738,996,798.95	18.84%
Demak	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Jepara	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Jepara	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Jepara	2018	Rp369,330,454,700.00	Rp2,255,843,022,157.00	16.37%
Jepara	2019	Rp384,979,296,768.00	Rp2,413,822,993,348.00	15.95%
Jepara	2020	Rp419,363,320,517.00	Rp2,315,260,399,485.00	18.11%
Jepara	2021	Rp408,635,274,883.00	Rp2,380,695,935,358.00	17.16%
Karanganyar	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Karanganyar	2017	Rp415,142,563,370.00	Rp2,043,460,305,969.00	20.32%
Karanganyar	2018	Rp343,156,469,167.00	Rp2,113,929,231,663.00	16.23%
Karanganyar	2019	Rp387,763,013,239.00	Rp2,179,409,706,710.00	17.79%
Karanganyar	2020	Rp384,682,993,533.00	Rp2,121,386,179,225.00	18.13%
Karanganyar	2021	Rp426,649,591,411.95	Rp2,165,983,748,571.95	19.70%
Klaten	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Klaten	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Klaten	2018	Rp395,884,244,135.42	Rp2,577,961,130,135.42	15.36%
Klaten	2019	Rp311,648,401,655.44	Rp2,689,353,252,985.44	11.59%

Klaten	2020	Rp329,963,261,898.00	Rp2,578,135,836,354.00	12.80%
Klaten	2021	Rp315,304,009,782.00	Rp2,570,037,777,373.00	12.27%
Kudus	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kudus	2017	Rp366,031,203,778.00	Rp198,213,078,247.00	184.67%
Kudus	2018	Rp337,364,609,424.00	Rp1,996,530,094,357.00	16.90%
Kudus	2019	Rp343,824,122,868.00	Rp2,090,430,364,413.00	16.45%
Kudus	2020	Rp383,892,971,961.00	Rp2,016,176,986,239.00	19.04%
Kudus	2021	Rp507,167,074,775.00	Rp2,163,634,437,714.00	23.44%
Magelang	2016	Rp288,485,678,128.00	Rp2,036,310,089,428.00	14.17%
Magelang	2017	Rp403,561,238,310.00	Rp2,271,336,015,858.00	17.77%
Magelang	2018	Rp325,089,093,092.00	Rp2,302,190,543,616.00	14.12%
Magelang	2019	Rp417,178,099,961.00	Rp2,575,439,825,755.00	16.20%
Magelang	2020	Rp329,769,193,224.00	Rp2,380,457,680,604.00	13.85%
Magelang	2021	Rp375,378,465,373.00	Rp2,469,754,315,099.00	15.20%
Pati	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Pati	2017	Rp449,821,345,800.00	Rp2,769,242,943,472.00	16.24%
Pati	2018	Rp384,041,846,939.00	Rp2,789,055,859,854.00	13.77%
Pati	2019	Rp363,997,151,178.00	Rp2,838,881,396,181.00	12.82%
Pati	2020	Rp371,708,005,192.00	Rp2,662,375,457,006.00	13.96%
Pati	2021	Rp388,644,537,358.00	Rp2,725,292,359,669.00	14.26%
Pekalongan	2016	Rp310,572,581,551.98	Rp1,787,351,674,572.98	17.38%
Pekalongan	2017	Rp305,394,299,060.77	Rp2,067,907,851,793.77	14.77%
Pekalongan	2018	Rp311,288,143,681.83	Rp2,101,449,302,496.83	14.81%
Pekalongan	2019	Rp341,344,415,574.51	Rp2,182,770,952,455.51	15.64%
Pekalongan	2020	Rp341,901,469,549.15	Rp2,061,798,474,096.15	16.58%
Pekalongan	2021	Rp346,599,468,113.44	Rp2,078,543,512,922.44	16.68%

Pemalang	2016	Rp275,458,054,016.00	Rp2,122,514,280,374.00	12.98%
Pemalang	2017	Rp425,893,266,850.00	Rp2,353,030,274,957.00	18.10%
Pemalang	2018	Rp300,481,887,079.00	Rp2,428,263,885,703.00	12.37%
Pemalang	2019	Rp350,559,139,753.00	Rp2,636,036,843,851.00	13.30%
Pemalang	2020	Rp328,353,248,698.00	Rp2,449,008,577,285.00	13.41%
Pemalang	2021	Rp365,393,902,790.00	Rp2,605,029,836,438.00	14.03%
Purbalingga	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purbalingga	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purbalingga	2018	Rp282,679,019,517.00	Rp1,948,442,029,100.00	14.51%
Purbalingga	2019	Rp305,996,806,188.00	Rp2,076,658,114,142.00	14.74%
Purbalingga	2020	Rp313,618,688,781.00	Rp1,952,749,301,274.00	16.06%
Purbalingga	2021	Rp377,882,022,370.39	Rp2,054,843,644,547.39	18.39%
Purworejo	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purworejo	2017	Rp298,606,494,653.00	Rp2,114,807,792,154.00	14.12%
Purworejo	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Purworejo	2019	Rp280,396,155,599.65	Rp2,172,436,925,113.65	12.91%
Purworejo	2020	Rp304,800,202,905.00	Rp2,166,947,747,648.00	14.07%
Purworejo	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Rembang	2016	Rp234,168,365,750.55	Rp1,564,868,839,955.55	14.96%
Rembang	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Rembang	2018	Rp296,676,436,263.15	Rp1,785,911,075,230.15	16.61%
Rembang	2019	Rp308,445,489,137.31	Rp1,921,899,884,311.31	16.05%
Rembang	2020	Rp326,670,124,350.50	Rp1,878,325,919,915.50	17.39%
Rembang	2021	Rp404,100,646,579.56	Rp1,911,328,505,019.46	21.14%
Sragen	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Sragen	2017	Rp404,569,404,722.00	Rp2,187,032,686,896.00	18.50%

Sragen	2018	Rp334,303,284,344.00	Rp2,176,997,511,640.00	15.36%
Sragen	2019	Rp368,325,799,601.00	Rp2,300,826,069,513.00	16.01%
Sragen	2020	Rp394,464,906,604.00	Rp2,212,824,974,529.00	17.83%
Sragen	2021	Rp537,265,408,211.00	Rp2,336,721,727,716.00	22.99%
Sukoharjo	2016	Rp363,163,428,162.00	Rp1,931,896,575,824.00	18.80%
Sukoharjo	2017	Rp464,567,409,857.00	Rp2,055,571,033,667.00	22.60%
Sukoharjo	2018	Rp433,485,481,219.00	Rp2,055,517,964,074.00	21.09%
Sukoharjo	2019	Rp458,742,223,869.00	Rp2,143,687,569,516.00	21.40%
Sukoharjo	2020	Rp469,540,567,890.00	Rp2,040,394,761,328.00	23.01%
Sukoharjo	2021	Rp528,354,094,902.00	Rp2,119,633,370,538.00	24.93%
Tegal	2016	Rp316,051,189,733.69	Rp2,161,161,059,587.60	14.62%
Tegal	2017	Rp375,531,165,351.20	Rp2,450,766,552,130.20	15.32%
Tegal	2018	Rp372,282,676,054.62	Rp2,524,365,919,814.62	14.75%
Tegal	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tegal	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tegal	2021	Rp591,004,284,313.00	Rp2,862,559,366,052.00	20.65%
Temanggung	2016	Rp281,328,148,970.00	Rp1,678,688,079,170.00	16.76%
Temanggung	2017	Rp308,466,748,340.00	Rp1,779,850,394,321.00	17.33%
Temanggung	2018	Rp252,019,934,778.00	Rp1,731,235,867,161.00	14.56%
Temanggung	2019	Rp278,313,775,793.00	Rp1,878,383,823,682.00	14.82%
Temanggung	2020	Rp307,488,084,365.00	Rp1,830,848,453,347.00	16.79%
Temanggung	2021	Rp363,128,342,571.00	Rp1,971,005,990,029.00	18.42%
Wonogiri	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Wonogiri	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Wonogiri	2018	Rp269,032,427,619.00	Rp2,298,176,600,990.00	11.71%
Wonogiri	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%

Wonogiri	2020	Rp274,293,129,950.00	Rp2,273,678,538,635.00	12.06%
Wonogiri	2021	Rp241,300,072,863.00	Rp2,303,564,898,937.00	10.48%
Kota Magelang	2016	Rp220,315,848,702.00	Rp840,042,626,525.00	26.23%
Kota Magelang	2017	Rp233,557,714,356.00	Rp909,525,862,920.00	25.68%
Kota Magelang	2018	Rp249,877,424,347.00	Rp908,089,485,909.00	27.52%
Kota Magelang	2019	Rp273,582,932,151.00	Rp967,785,834,243.00	28.27%
Kota Magelang	2020	Rp290,756,816,510.00	Rp946,188,761,537.00	30.73%
Kota Magelang	2021	Rp319,391,277,825.00	Rp994,366,987,776.00	32.12%
Kota Pekalongan	2016	Rp178,604,460,870.00	Rp857,642,985,779.00	20.83%
Kota Pekalongan	2017	Rp192,002,871,181.00	Rp915,920,377,495.00	20.96%
Kota Pekalongan	2018	Rp179,224,408,698.00	Rp905,231,572,568.00	19.80%
Kota Pekalongan	2019	Rp212,777,435,293.60	Rp971,624,464,120.61	21.90%
Kota Pekalongan	2020	Rp229,867,935,360.95	Rp935,155,394,614.95	24.58%
Kota Pekalongan	2021	Rp252,037,004,472.02	Rp966,372,557,051.02	26.08%
Kota Salatiga	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Salatiga	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Salatiga	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Salatiga	2019	Rp236,086,898,372.00	Rp928,019,899,150.00	25.44%
Kota Salatiga	2020	Rp219,539,400,332.00	Rp890,223,683,933.00	24.66%
Kota Salatiga	2021	Rp280,684,937,797.00	Rp946,191,087,524.00	29.66%
Kota Semarang	2016	Rp1,491,645,900,065.00	Rp4,103,151,795,483.00	36.35%
Kota Semarang	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Semarang	2018	Rp1,821,274,103,250.00	Rp4,234,394,060,362.00	43.01%
Kota Semarang	2019	Rp2,066,333,418,588.00	Rp4,565,340,827,417.00	45.26%
Kota Semarang	2020	Rp2,024,537,808,307.00	Rp4,400,500,838,480.00	46.01%
Kota Semarang	2021	Rp2,385,944,758,477.00	Rp4,822,887,281,737.00	49.47%

Bantul	2016	Rp404,454,703,746.07	Rp2,000,334,166,353.84	20.22%
Bantul	2017	Rp494,179,068,471.97	Rp2,088,878,989,570.45	23.66%
Bantul	2018	Rp462,653,956,229.75	Rp2,227,752,027,348.97	20.77%
Bantul	2019	Rp505,929,472,001.63	Rp2,269,539,168,277.63	22.29%
Bantul	2020	Rp479,610,812,119.42	Rp2,104,840,663,186.42	22.79%
Bantul	2021	Rp491,670,724,028.10	Rp2,235,655,701,355.10	21.99%
Gunung Kidul	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Gunung Kidul	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Gunung Kidul	2018	Rp226,984,458,096.18	Rp1,850,894,408,120.73	12.26%
Gunung Kidul	2019	Rp254,810,945,072.62	Rp2,113,060,424,939.34	12.06%
Gunung Kidul	2020	Rp228,208,528,545.52	Rp1,792,377,765,120.73	12.73%
Gunung Kidul	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kulon Progo	2016	Rp180,273,363,594.69	Rp1,358,070,874,847.32	13.27%
Kulon Progo	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kulon Progo	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kulon Progo	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kulon Progo	2020	Rp254,422,026,357.32	Rp1,582,435,615,633.32	16.08%
Kulon Progo	2021	Rp307,154,342,135.73	Rp1,629,730,063,142.73	18.85%
Sleman	2016	Rp717,151,176,028.57	Rp2,329,097,456,006.80	30.79%
Sleman	2017	Rp825,637,751,681.82	Rp2,615,515,097,398.98	31.57%
Sleman	2018	Rp894,272,961,557.85	Rp2,712,794,080,456.21	32.97%
Sleman	2019	Rp972,049,575,206.45	Rp2,840,636,285,803.45	34.22%
Sleman	2020	Rp788,246,742,427.73	Rp2,451,050,870,612.73	32.16%
Sleman	2021	Rp803,679,358,719.08	Rp2,793,328,384,634.58	28.77%
Gresik	2016	Rp715,480,938,191.16	Rp2,522,076,193,169.16	28.37%
Gresik	2017	Rp871,564,498,248.20	Rp2,742,201,536,264.20	31.78%

Gresik	2018	Rp957,255,706,268.71	Rp2,876,343,695,519.71	33.28%
Gresik	2019	Rp980,776,381,995.43	Rp3,119,200,157,022.91	31.44%
Gresik	2020	Rp924,657,913,563.07	Rp2,939,477,566,194.07	31.46%
Gresik	2021	Rp1,031,387,734,236.41	Rp3,133,574,194,041.41	32.91%
Lamongan	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Lamongan	2017	Rp429,200,063,876.82	Rp2,716,042,671,044.82	15.80%
Lamongan	2018	Rp436,595,179,671.02	Rp2,811,062,543,333.02	15.53%
Lamongan	2019	Rp472,002,823,163.86	Rp2,864,496,711,416.86	16.48%
Lamongan	2020	Rp481,752,331,339.49	Rp2,838,272,211,782.49	16.97%
Lamongan	2021	Rp604,587,635,067.78	Rp2,975,019,936,520.51	20.32%
Lumajang	2016	Rp242,111,541,251.56	Rp1,842,511,574,633.02	13.14%
Lumajang	2017	Rp324,253,671,099.01	Rp1,956,127,822,292.10	16.58%
Lumajang	2018	Rp270,139,870,884.23	Rp2,077,396,056,404.23	13.00%
Lumajang	2019	Rp296,467,374,174.37	Rp2,186,593,815,093.29	13.56%
Lumajang	2020	Rp300,263,112,642.77	Rp2,118,849,571,641.14	14.17%
Lumajang	2021	Rp325,045,892,762.36	Rp2,161,880,436,241.41	15.04%
Madiun	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Madiun	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Madiun	2018	Rp219,041,431,266.71	Rp1,829,582,126,042.71	11.97%
Madiun	2019	Rp229,206,394,170.27	Rp1,947,016,775,096.37	11.77%
Madiun	2020	Rp258,211,505,535.08	Rp1,842,457,400,838.08	14.01%
Madiun	2021	Rp333,154,568,459.37	Rp1,978,493,284,512.37	16.84%
Magetan	2016	Rp165,617,751,404.46	Rp1,670,356,413,328.46	9.92%
Magetan	2017	Rp212,806,288,638.89	Rp1,757,892,910,553.89	12.11%
Magetan	2018	Rp196,826,063,935.96	Rp1,828,792,472,409.96	10.76%
Magetan	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%

Magetan	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Magetan	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Pamekasan	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Pamekasan	2017	Rp243,311,843,020.28	Rp1,906,203,284,544.28	12.76%
Pamekasan	2018	Rp222,410,664,049.09	Rp1,841,101,038,915.09	12.08%
Pamekasan	2019	Rp219,671,437,717.13	Rp1,920,014,132,343.13	11.44%
Pamekasan	2020	Rp232,262,477,004.71	Rp1,824,167,916,966.71	12.73%
Pamekasan	2021	Rp205,969,039,947.27	Rp1,879,358,460,454.42	10.96%
Probolinggo	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Probolinggo	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Probolinggo	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Probolinggo	2019	Rp245,431,703,862.63	Rp2,405,134,988,058.74	10.20%
Probolinggo	2020	Rp254,884,191,561.70	Rp2,331,513,790,016.76	10.93%
Probolinggo	2021	Rp300,398,775,730.94	Rp2,399,817,125,466.09	12.52%
Sidoarjo	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Sidoarjo	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Sidoarjo	2018	Rp1,685,558,666,147.01	Rp4,332,577,984,768.01	38.90%
Sidoarjo	2019	Rp1,689,953,213,262.69	Rp4,444,626,346,624.69	38.02%
Sidoarjo	2020	Rp1,798,515,529,274.65	Rp4,411,615,214,581.65	40.77%
Sidoarjo	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Situbondo	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Situbondo	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Situbondo	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Situbondo	2019	Rp204,727,875,621.05	Rp1,819,658,453,341.45	11.25%
Situbondo	2020	Rp218,845,065,632.84	Rp1,766,329,560,607.17	12.39%
Situbondo	2021	Rp228,766,562,733.20	Rp1,752,515,838,351.34	13.05%

Trenggalek	2016	Rp182,174,291,709.04	Rp1,632,530,563,154.04	11.16%
Trenggalek	2017	Rp253,224,852,674.12	Rp1,791,691,906,785.12	14.13%
Trenggalek	2018	Rp233,808,792,639.21	Rp1,824,359,680,452.27	12.82%
Trenggalek	2019	Rp285,134,071,594.78	Rp1,990,863,032,535.78	14.32%
Trenggalek	2020	Rp257,977,450,483.90	Rp1,831,177,618,127.90	14.09%
Trenggalek	2021	Rp233,490,679,200.57	Rp1,859,926,435,396.71	12.55%
Tuban	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tuban	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tuban	2018	Rp442,531,646,743.74	Rp2,455,664,334,976.63	18.02%
Tuban	2019	Rp518,003,562,562.47	Rp2,650,229,496,675.59	19.55%
Tuban	2020	Rp566,077,757,668.16	Rp2,578,839,055,752.70	21.95%
Tuban	2021	Rp614,733,285,905.09	Rp2,693,892,209,851.81	22.82%
Kota Batu	2016	Rp109,533,498,033.54	Rp803,450,046,047.54	13.63%
Kota Batu	2017	Rp149,423,863,144.26	Rp849,443,705,762.26	17.59%
Kota Batu	2018	Rp162,574,646,582.18	Rp984,939,247,451.18	16.51%
Kota Batu	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Batu	2020	Rp136,766,373,974.97	Rp893,038,839,330.97	15.31%
Kota Batu	2021	Rp147,007,052,561.30	Rp969,962,352,371.30	15.16%
Kota Blitar	2016	Rp131,920,190,720.68	Rp847,187,760,012.26	15.57%
Kota Blitar	2017	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Blitar	2018	Rp163,026,005,752.93	Rp894,409,176,023.96	18.23%
Kota Blitar	2019	Rp166,140,178,781.39	Rp940,722,867,100.29	17.66%
Kota Blitar	2020	Rp174,590,638,444.23	Rp880,876,905,111.23	19.82%
Kota Blitar	2021	Rp297,619,527,754.02	Rp1,041,505,261,947.02	28.58%
Kota Madiun	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Madiun	2017	Rp230,608,717,369.14	Rp957,624,973,325.14	24.08%

Kota Madiun	2018	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Madiun	2019	Rp246,032,153,521.65	Rp1,015,435,399,385.97	24.23%
Kota Madiun	2020	Rp248,944,404,487.59	Rp1,059,913,793,139.59	23.49%
Kota Madiun	2021	Rp265,920,295,216.86	Rp1,100,682,829,130.86	24.16%
Kota Malang	2016	Rp477,541,556,464.64	Rp1,741,394,250,709.64	27.42%
Kota Malang	2017	Rp588,276,962,084.13	Rp1,971,916,657,660.00	29.83%
Kota Malang	2018	Rp556,888,383,143.67	Rp2,040,194,240,906.67	27.30%
Kota Malang	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Malang	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Malang	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Probolinggo	2016	Rp171,307,335,436.52	Rp886,186,420,396.52	19.33%
Kota Probolinggo	2017	Rp203,937,860,275.87	Rp910,852,078,015.87	22.39%
Kota Probolinggo	2018	Rp175,789,670,858.90	Rp987,602,131,967.90	17.80%
Kota Probolinggo	2019	Rp175,775,285,716.82	Rp962,134,794,308.82	18.27%
Kota Probolinggo	2020	Rp183,680,648,895.19	Rp922,027,675,562.60	19.92%
Kota Probolinggo	2021	Rp212,846,009,771.41	Rp993,879,239,176.41	21.42%
Kota Surabaya	2016	Rp4,090,206,769,287.53	Rp6,825,754,275,891.53	59.92%
Kota Surabaya	2017	Rp5,161,844,571,171.67	Rp8,033,573,163,669.60	64.25%
Kota Surabaya	2018	Rp4,973,031,004,727.10	Rp8,175,219,120,669.10	60.83%
Kota Surabaya	2019	Rp5,381,920,253,809.67	Rp8,765,153,020,782.67	61.40%
Kota Surabaya	2020	Rp4,289,960,292,372.98	Rp7,545,416,994,175.97	56.86%
Kota Surabaya	2021	Rp4,727,288,629,669.69	Rp8,326,878,076,226.29	56.77%
Lebak	2016	Rp304,485,931,937.56	Rp2,142,027,386,820.00	14.21%
Lebak	2017	Rp467,474,538,181.28	Rp1,941,400,578,343.00	24.08%
Lebak	2018	Rp349,363,426,873.84	Rp2,504,432,439,567.84	13.95%
Lebak	2019	Rp334,722,736,899.84	Rp2,676,822,291,688.84	12.50%

Lebak	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Lebak	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Pandeglang	2016	Rp198,750,877,114.00	Rp2,209,655,129,381.00	8.99%
Pandeglang	2017	Rp387,100,584,855.00	Rp2,465,844,714,731.00	15.70%
Pandeglang	2018	Rp196,996,806,997.25	Rp2,362,130,982,589.25	8.34%
Pandeglang	2019	Rp218,326,857,973.91	Rp2,637,673,439,002.91	8.28%
Pandeglang	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Pandeglang	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Serang	2016	Rp590,665,666,125.00	Rp2,468,077,495,354.00	23.93%
Serang	2017	Rp815,399,914,407.00	Rp2,810,704,635,828.00	29.01%
Serang	2018	Rp697,085,199,649.00	Rp2,918,628,102,041.00	23.88%
Serang	2019	Rp705,281,901,421.00	Rp3,124,153,151,296.00	22.58%
Serang	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Serang	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Cilegon	2016	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Cilegon	2017	Rp652,084,326,149.00	Rp1,708,838,034,694.00	38.16%
Kota Cilegon	2018	Rp578,335,346,296.00	Rp1,630,020,024,950.00	35.48%
Kota Cilegon	2019	Rp634,798,066,162.00	Rp1,769,980,669,475.00	35.86%
Kota Cilegon	2020	Rp717,400,615,564.00	Rp1,761,192,008,114.00	40.73%
Kota Cilegon	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Kota Serang	2016	Rp126,900,900,019.00	Rp1,132,266,273,590.00	11.21%
Kota Serang	2017	Rp232,458,208,409.00	Rp1,231,344,645,550.00	18.88%
Kota Serang	2018	Rp164,218,548,654.00	Rp1,242,437,572,372.00	13.22%
Kota Serang	2019	Rp190,029,710,255.00	Rp1,342,262,284,840.00	14.16%
Kota Serang	2020	Rp180,263,229,327.00	Rp1,265,514,990,409.00	14.24%
Kota Serang	2021	Rp206,238,434,813.00	Rp1,466,972,945,007.00	14.06%

Kota Tangerang	2016	Rp1,590,080,330,000.00	Rp3,388,541,592,672.00	46.93%
Kota Tangerang	2017	Rp1,991,898,969,395.00	Rp3,930,164,161,844.00	50.68%
Kota Tangerang	2018	Rp1,864,385,584,947.00	Rp3,971,571,451,402.00	46.94%
Kota Tangerang	2019	Rp2,027,112,805,905.00	Rp4,277,659,353,829.00	47.39%
Kota Tangerang	2020	Rp1,649,002,723,454.00	Rp3,648,663,446,803.00	45.19%
Kota Tangerang	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tangerang Selatan	2016	Rp1,346,240,155,744.24	Rp2,664,158,764,561.24	50.53%
Tangerang Selatan	2017	Rp1,622,004,639,363.00	Rp3,000,278,801,133.00	54.06%
Tangerang Selatan	2018	Rp1,621,710,653,274.00	Rp3,211,105,498,451.00	50.50%
Tangerang Selatan	2019	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tangerang Selatan	2020	Rp0.00	Rp0.00	0.00%
Tangerang Selatan	2021	Rp0.00	Rp0.00	0.00%